

**IMPLIKASI KONEKSI POLITIK DAN KOMITE AUDIT TERHADAP
PENGUNGKAPAN ANTIKORUPSI**



Disusun Oleh:

Terra Blasefa

24919025

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 24 Mei 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

TERRA BLASEFA

No. Mhs. : 24919025

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

IMPLIKASI KONEKSI POLITIK DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN ANTIKORUPSI

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Dr. Aditya Pandu Wicaksono, S.E., Ak., M.Ak.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbill'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Antikorupsi” dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan tulus ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, kemudahan, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis dalam setiap proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, serta dengan penuh kesabaran membimbing penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Keluarga tercinta, Ibu Susanty, S.Mn., Bapak Kushertanto, S.Mn., dan Kakak Drg. Tessa Festiana, atas doa, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Sahabat tersayang, Wella Eventsiy, S.Ak. dan Chairunnisa Bayuningtyas, S.Ak., atas dukungan, kebersamaan, serta bantuan yang diberikan kepada penulis, baik dalam suka maupun duka sejak masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.

5. Seorang sahabat, yang selalu menemani di setiap masa sulit penulis, atas dukungan, perhatian, serta kesediaannya mendengarkan dan membantu penulis selama dalam setiap proses penyusunan tesis ini.
6. Sahabat-sahabat penulis sejak masa Sekolah Menengah Pertama yang tetap memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, meskipun dalam bentuk sederhana, namun tetap berarti dalam proses penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Mei 2026

Terra Blasefa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	10
2.1.2. Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>)	12
2.1.3. Koneksi Politik.....	15
2.1.4. Pengungkapan Anti Korupsi	17
2.1.5. Komite Audit	19
2.2. Penelitian Terdahulu	22
2.3. Pengembangan Hipotesis Penelitian.....	24

2.3.1.	Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Antikorupsi.....	24
2.3.2.	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi.....	26
2.3.3.	Pengaruh Kompetensi/Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi	28
2.3.4.	Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi	30
2.4.	Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III.....		34
METODOLOGI PENELITIAN		34
3.1.	Desain Penelitian	34
3.2.	Populasi dan Sampel	35
3.3.	Jenis dan Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	37
3.4.1.	Variabel Dependen.....	37
3.4.2.	Variabel Independen	38
3.4.2.1.	Koneksi Politik (KOP).....	38
3.4.2.2.	Ukuran Komite Audit (UKA).....	40
3.4.2.3.	Kompetensi/Keahlian Anggota (KKA)	40
3.4.2.4.	Frekuensi Rapat Komite Audit (FRK).....	41
3.4.3.	Variabel Kontrol	42
3.5.	Teknik Analisis Data.....	45
3.5.1.	Analisis Statistik Deskriptif	45
3.5.2.	Analisis Regresi Data Panel.....	46
3.5.2.1.	Model Regresi Data Panel	47
3.5.2.2.	Uji Estimasi Model	48
3.5.2.3.	Uji Asumsi Klasik	50
3.5.2.4.	Uji Hipotesis	51

BAB IV	53
PEMBAHASAN	53
4.1. Deskripsi Data Penelitian	53
4.2. Statistik Deskriptif Variabel	54
4.3. Uji Estimasi Model.....	58
4.3.1. Uji Chow	58
4.3.2. Uji Hausman	58
4.3.3. Uji Multiple Langrange.....	58
4.4. Uji Asumsi Klasik.....	59
4.4.1. Uji Multikolinearitas	59
4.5. Uji Hipotesis.....	60
4.5.1. Uji t	60
4.5.2. Uji F	61
4.5.3. Uji Koefisien Determinasi	62
4.6. Pembahasan	62
4.6.1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Pengungkapan Antikorupsi	62
4.6.2. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi	65
4.6.3. Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi	68
4.6.4. Pengaruh Frekuensi Rapat terhadap Pengungkapan Antikorupsi	71
4.6.5. Analisis Tambahan per Sektor	74
BAB V	77
KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Implikasi.....	78
5.3. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1. Pengukuran Variabel.....	44
Tabel 3. 2. Kriteria Pemilihan Model.....	50
Tabel 4. 1. Kriteria Pemilihan Sampel.....	53
Tabel 4. 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	54
Tabel 4. 3. Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4. 4. Hasil Uji t	60
Tabel 4. 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	62
Tabel 4. 6. Hasil Robustness Check x2.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Indeks Persepsi Indonesia.....	2
--	----------

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Data Sampel Penelitian.....	84
LAMPIRAN 2 Hasil Analisis Data.....	112
LAMPIRAN 3 Hasil Robustness Check per Sektor	114

BAB I

PENDAHULUAN

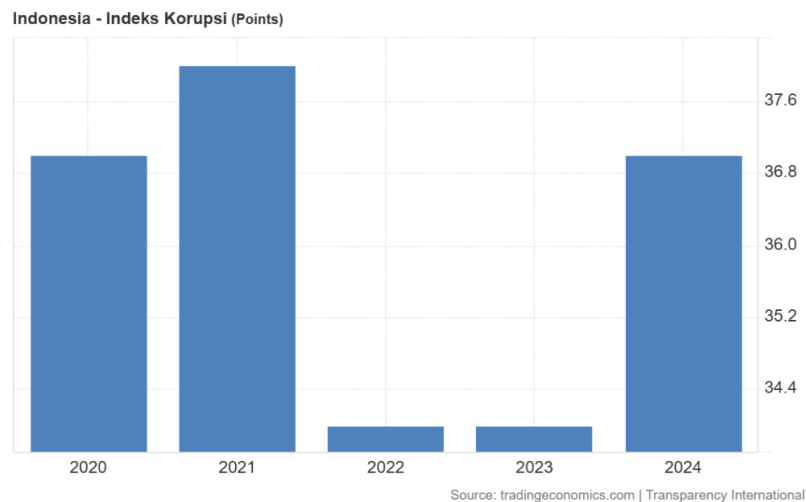
1.1. Latar Belakang

Korupsi telah lama menjadi paradoks dalam perjalanan pembangunan ekonomi dan politik Indonesia. Di satu sisi, negara ini terus menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi, transparansi, dan tata kelola yang bersih melalui berbagai kebijakan dan pembentukan institusi formal. Namun di sisi lain, berbagai kasus yang terungkap selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa korupsi bukan lagi sekadar pelanggaran hukum individu, melainkan persoalan sistemik yang tertanam dalam struktur sosial, ekonomi, dan kelembagaan (Transparency International, 2024). Fenomena korupsi telah melintasi batas institusional, tidak hanya terjadi di sektor pemerintahan dan lembaga publik, tetapi juga merambah sektor korporasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam banyak kasus, praktik korupsi tidak muncul secara kasat mata, melainkan beroperasi secara laten melalui relasi kekuasaan, legitimasi politik, serta praktik pelaporan perusahaan yang tampak profesional dan patuh regulasi secara formal, namun tidak sepenuhnya mencerminkan integritas substantif (Landis & Paglietti, 2025).

Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi meskipun menunjukkan perbaikan terbatas dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun 2024. Transparency International (2024) mencatat skor CPI Indonesia sebesar 37 poin dengan peringkat ke-99 dari 180 negara. Meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, capaian ini masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Vietnam yang memiliki tingkat persepsi korupsi publik yang relatif lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan regulasi

dan standar pelaporan belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan kualitas praktik antikorupsi di tingkat perusahaan. Utami & Barokah (2025) menemukan bahwa peningkatan pengungkapan antikorupsi di negara berkembang sering kali bersifat simbolik dan belum mencerminkan penguatan sistem pengendalian internal secara substantif. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ameraldo (2025) yang menunjukkan bahwa pengungkapan antikorupsi kerap digunakan sebagai respons legitimasi terhadap tekanan regulatif dan sosial, bukan sebagai indikasi komitmen nyata terhadap pencegahan korupsi.

Gambar 1. 1. Indeks Persepsi Indonesia



Dalam dua dekade terakhir, praktik korupsi berkembang seiring meningkatnya kompleksitas perekonomian modern dan globalisasi pasar. Korupsi tidak lagi selalu berbentuk suap langsung atau penggelapan dana publik, tetapi juga dapat terjadi melalui lemahnya efektivitas pengawasan internal perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Salah satu faktor tata kelola yang turut mendapat perhatian adalah koneksi politik (*political connection*), yaitu hubungan antara

perusahaan dan aktor politik yang berpotensi memengaruhi kualitas pengawasan serta transparansi perusahaan (Fatawijaya et al., 2025).

Pada tata kelola perusahaan di Indonesia, koneksi politik paling relevan tercermin melalui keterlibatan individu berlatar belakang politik dalam struktur pengawasan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memandang koneksi politik secara abstrak, melainkan mengidentifikasinya secara operasional melalui proporsi anggota dewan komisaris independen yang memiliki latar belakang politik, baik sebagai mantan atau pejabat aktif pemerintahan, anggota legislatif, pengurus partai politik, maupun individu dengan afiliasi politik yang signifikan. Pendekatan berbasis proporsi ini memungkinkan pengukuran intensitas pengaruh politik dalam mekanisme pengawasan perusahaan, bukan sekadar keberadaannya. Pendekatan ini sejalan dengan Candra & Joni (2025) yang menegaskan bahwa keterlibatan aktor politik pada level dewan pengawas independen memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Dalam sistem tata kelola dua tingkat (*two-tier system*) di Indonesia, dewan komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi manajemen perusahaan. Namun, efektivitas pengawasan perusahaan tidak hanya bergantung pada struktur dewan komisaris, tetapi juga pada mekanisme pengawasan internal yang dijalankan perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan komite audit menjadi penting dalam memastikan bahwa praktik pengungkapan perusahaan dilakukan secara transparan dan tidak hanya bersifat simbolik sebagai sarana legitimasi perusahaan. Seiring meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, standar pelaporan keberlanjutan internasional seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) menjadi rujukan utama dalam menilai integritas dan etika bisnis perusahaan. *GRI Standard 205* tentang antikorupsi

menekankan tiga aspek utama, yaitu penilaian risiko korupsi, pelatihan dan komunikasi kebijakan antikorupsi, serta pelaporan kasus korupsi dan tindakan yang diambil perusahaan. Dalam penelitian ini, pengungkapan antikorupsi diukur menggunakan pendekatan agregat dengan menggabungkan ketiga indikator inti GRI 205 sebagai satu indeks pengungkapan. Pendekatan ini merujuk pada Chouaibi et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pengukuran agregat lebih mampu menangkap kecenderungan umum perilaku pengungkapan perusahaan serta meningkatkan keterbandingan antarperusahaan dan antarperiode.

Pengungkapan antikorupsi dalam perusahaan sering kali digunakan sebagai sarana legitimasi untuk merespons tekanan publik dan regulatif. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berupaya mempertahankan penerimaan sosial melalui praktik pelaporan yang sesuai dengan ekspektasi lingkungan eksternal, meskipun tidak selalu diikuti oleh perubahan substantif dalam praktik internal perusahaan (Landis & Paglietti, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan internal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengungkapan antikorupsi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga mencerminkan kualitas pengendalian internal perusahaan. Dalam hal ini, komite audit memegang peranan sentral sebagai mekanisme pengawasan internal perusahaan. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan integritas pelaporan, efektivitas pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Efektivitas komite audit dapat tercermin melalui karakteristiknya, seperti ukuran komite audit, keahlian anggota, dan frekuensi rapat komite audit. Karakteristik tersebut dipandang mampu meningkatkan kualitas monitoring dan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan antikorupsi secara lebih transparan. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi masih menunjukkan

temuan yang beragam dan belum konsisten. Selain itu, dinamika hubungan politik dan bisnis melalui koneksi politik juga dipandang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan transparansi perusahaan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada koneksi politik atau tata kelola perusahaan secara umum, penelitian ini berfokus pada karakteristik komite audit sebagai mekanisme pengawasan internal dalam mendorong pengungkapan antikorupsi perusahaan. Penelitian ini menguji bagaimana ukuran komite audit, keahlian anggota, dan frekuensi rapat komite audit berkontribusi terhadap tingkat transparansi perusahaan dalam pengungkapan antikorupsi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan koneksi politik sebagai faktor tata kelola yang turut memengaruhi transparansi perusahaan.

Pemilihan sektor manufaktur dan sektor keuangan dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan empiris serta prinsip metodologis bahwa setiap penelitian perlu menyesuaikan karakteristik objek penelitian dengan variabel yang dianalisis agar hubungan yang diuji relevan dan dapat diinterpretasikan secara tepat. Literatur metodologi menyatakan bahwa pemilihan sektor yang terlalu heterogen berpotensi menimbulkan bias karena perbedaan karakteristik operasional, regulasi, dan tata kelola yang sulit dikendalikan secara empiris (Gormley & Matsa, 2014). Sektor manufaktur merupakan kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan memiliki rantai pasok yang panjang serta kompleks, sehingga sangat rentan terhadap risiko korupsi dalam proses perizinan, pengadaan, dan hubungan dengan regulator (Kementerian Perindustrian, 2023). Sementara itu, sektor keuangan berada di bawah pengawasan regulatif yang sangat ketat karena perannya sebagai penopang stabilitas sistem ekonomi dan pengelola dana publik, sehingga tuntutan

transparansi dan tata kelola, termasuk pengungkapan antikorupsi, menjadi jauh lebih tinggi (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Kedua sektor ini juga memiliki struktur tata kelola yang relatif seragam dan konsisten dalam penerapan pelaporan non-keuangan dibandingkan sektor lain, sehingga lebih memungkinkan untuk dilakukan perbandingan empiris yang terkendali. Dengan membatasi penelitian pada dua sektor ini, hubungan antara koneksi politik, komite audit, dan pengungkapan antikorupsi dapat diuji secara lebih fokus dan mendalam, sekaligus menghindari distorsi hasil akibat perbedaan karakteristik lintas sektor yang terlalu luas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pengungkapan antikorupsi yang masih relatif terbatas dalam literatur dibandingkan dengan pengungkapan CSR secara umum, serta pengujian secara simultan pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit dalam satu model penelitian. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan dalam mendorong transparansi, khususnya perusahaan di Indonesia yang memiliki dinamika hubungan antara politik dan bisnis yang kompleks. Dengan mempertimbangkan perbedaan konteks karakteristik sektor manufaktur dan keuangan yang memiliki tingkat keterlibatan kebijakan publik dan pengawasan regulatif yang tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris yang signifikan dalam memahami dinamika koneksi politik, tata kelola perusahaan, dan pengungkapan antikorupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

menguji secara empiris pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi perusahaan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi?
2. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi?
3. Apakah frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi?
4. Apakah keahlian keuangan anggota komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan antikorupsi (GRI 205).
2. Menganalisis pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi.
3. Menganalisis pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi.
4. Menganalisis pengaruh keahlian keuangan anggota komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam tiga dimensi utama:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai hubungan antara koneksi politik dan pengungkapan antikorupsi dalam kerangka *agency theory* dan *legitimacy theory* serta memperkaya pemahaman empiris mengenai peran karakteristik komite audit dalam konteks tata kelola perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN dalam memperkuat kebijakan mengenai efektivitas komite audit serta peningkatan transparansi pelaporan keberlanjutan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi internal untuk meningkatkan integritas pelaporan dan memperkuat tata kelola yang berorientasi pada akuntabilitas dan kepercayaan publik.

3. Manfaat Sosial dan Kebijakan Publik

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan dalam menilai sejauh mana perusahaan publik menunjukkan komitmen nyata terhadap antikorupsi, serta menjadi referensi dalam merancang kebijakan transparansi dan tata kelola korporasi yang berkeadilan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memuat lima bab yang terdiri sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan mengenai alasan pentingnya penelitian dilakukan, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan gambaran sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat landasan teori seperti teori keagenan dan legitimasi, definisi konsep variabel, hubungan antarvariabel, penelitian terdahulu, dasar penyusunan hipotesis penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan yang mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan utama penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan salah satu fondasi utama dalam studi ekonomi dan akuntansi yang menjelaskan dinamika hubungan antara pemilik dan pengelola organisasi. Jensen dan Mecklin (1976) memperkenalkan konsep ini dalam kerangka hubungan kontraktual antara principal (pemilik modal) dan agen (manajer) di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengelola sumber daya dengan harapan keputusan yang diambil akan memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Namun, dalam praktiknya, kedua pihak sering kali memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Konflik kepentingan ini melahirkan apa yang disebut *agency problem*, yakni ketika agen memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan kepentingan prinsipal. Sifat dasar manusia yang rasional dan berorientasi pada keuntungan pribadi membuat agen cenderung mengambil keputusan yang dapat memberikan manfaat langsung kepadanya, meskipun berpotensi merugikan pemilik modal. Eisenhardt (1989) menegaskan bahwa teori agensi berakar pada tiga asumsi, manusia cenderung mementingkan diri sendiri (*self-interest*), memiliki rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), dan bersifat oportunistik (*opportunism*).

Masalah keagenan ini semakin nyata ketika terdapat asimetri informasi, yaitu kondisi di mana agen memiliki informasi lebih banyak dan lebih detail dibanding prinsipal. Penelitian oleh Duong & Nguyen (2025) menyatakan asimetri informasi dalam hubungan keagenan menimbulkan dua permasalahan utama, yaitu *adverse selection* yang muncul akibat keterbatasan informasi sebelum kontrak disepakati, serta

moral hazard yang tercermin dalam perilaku oportunistik manajemen setelah kontrak berlangsung. Model *principal agent* menegaskan bahwa kondisi ini memungkinkan terjadinya penyimpangan perilaku manajerial apabila mekanisme pengawasan dan transparansi tidak berjalan efektif. Bentuknya bisa berupa manipulasi laporan keuangan, menyembunyikan risiko, atau penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengendalian (*control mechanisms*) untuk mengurangi konflik antara agen dan prinsipal. Mekanisme tersebut dapat berupa pengawasan langsung, kontrak berbasis insentif, atau struktur tata kelola yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Jensen dan Meckling (1976) menyebut biaya yang timbul akibat konflik ini sebagai *agency cost*, yang meliputi biaya pengawasan, biaya ikatan (*bonding cost*), serta kerugian sisa akibat keputusan agen yang tidak sepenuhnya efisien (*residual loss*).

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan relevansi teori agensi terhadap efektivitas tata kelola organisasi. Dalam buku *Pay without Performance* oleh Fried, menjelaskan bagaimana kegagalan pengawasan menyebabkan peningkatan kompensasi manajerial tanpa korelasi dengan kinerja, mencerminkan tingginya biaya keagenan. Demikian pula, perusahaan dengan struktur pengawasan lemah cenderung memiliki kinerja pasar yang lebih rendah akibat perilaku oportunistik manajer. Fenomena tersebut juga terlihat di banyak negara berkembang, di mana pemisahan kepemilikan dan pengelolaan sering kali tidak berjalan ideal. OECD (2021) mencatat bahwa lemahnya sistem pengawasan internal dan keterbatasan transparansi menjadi penyebab utama rendahnya kualitas tata kelola korporasi di Asia Tenggara. Kondisi ini menggambarkan betapa teori agensi masih sangat relevan dalam menjelaskan berbagai persoalan etika, akuntabilitas, dan efisiensi di dunia bisnis modern.

Teori agensi tidak hanya terbatas pada hubungan antara pemilik dan manajer, tetapi juga menjelaskan dinamika keagenan di antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Manajer tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan organisasi. Karena itu, sistem pengendalian internal yang efektif dan transparansi informasi menjadi bagian integral dari upaya mengurangi konflik keagenan. Dengan demikian, teori agensi tidak hanya menjelaskan hubungan ekonomi yang rasional antara dua pihak, tetapi juga menggambarkan realitas organisasi yang kompleks, di mana pengawasan, akuntabilitas, dan etika saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

2.1.2. Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi berangkat dari pemikiran bahwa keberlangsungan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh kinerja ekonomi, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial yang diberikan oleh lingkungan tempat organisasi tersebut beroperasi. Dowling dan Pfeffer (1975) menegaskan bahwa organisasi secara berkelanjutan berupaya memastikan bahwa tujuan, tindakan, dan outputnya selaras dengan nilai, norma, serta kepercayaan yang dianut masyarakat. Ketidaksesuaian antara nilai organisasi dan nilai sosial akan menciptakan *legitimacy gap* yang berpotensi mengancam dukungan publik dan, pada akhirnya, keberlanjutan organisasi. Dalam kerangka ini, legitimasi dipahami sebagai bentuk *social contract* antara organisasi dan masyarakat, di mana organisasi memperoleh hak untuk beroperasi selama dianggap bertindak sesuai dengan ekspektasi sosial (Suchman, 1995).

Suchman (1995) mengklasifikasikan legitimasi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu legitimasi pragmatis, legitimasi moral, dan legitimasi kognitif. Legitimasi

pragmatis diperoleh ketika organisasi mampu memberikan manfaat langsung kepada pemangku kepentingan, legitimasi moral muncul ketika tindakan organisasi dipersepsikan sebagai benar dan etis secara normatif, sedangkan legitimasi kognitif terbentuk ketika keberadaan dan aktivitas organisasi diterima sebagai sesuatu yang wajar dan *taken for granted* oleh masyarakat. Klasifikasi ini hingga kini masih menjadi kerangka dominan dalam menjelaskan bagaimana organisasi merespons tekanan sosial melalui strategi komunikasi dan pelaporan (Landis & Paglietti, 2025).

Legitimasi telah berkembang menjadi komponen strategis yang tidak terpisahkan dari tata kelola perusahaan. Perusahaan tidak lagi cukup hanya mencapai target finansial, tetapi juga dituntut untuk menunjukkan kepatuhan terhadap norma etika, lingkungan, dan sosial. Tekanan ini semakin menguat seiring dengan berkembangnya *sustainability paradigm*, di mana publik mengevaluasi perusahaan berdasarkan tanggung jawab sosial dan integritas, bukan semata-mata laba (Rudžionienė, 2025). Studi klasik Patten (1992) menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi tekanan publik akibat isu lingkungan cenderung meningkatkan pengungkapan sosial sebagai respons terhadap ancaman legitimasi. Temuan ini diperkuat oleh Tuo & Wu (2025) yang menunjukkan bahwa perusahaan secara strategis menyesuaikan pengungkapan dan praktik keberlanjutan sebagai respons terhadap tekanan legitimasi publik, khususnya ketika evaluasi sosial negatif berpotensi mengancam reputasi dan penerimaan sosial perusahaan.

Literatur kontemporer menegaskan bahwa praktik pengungkapan, termasuk pengungkapan antikorupsi, sering kali berfungsi sebagai alat legitimasi simbolik. Landis & Paglietti (2025) serta Ameraldo (2025) menunjukkan bahwa perusahaan di lingkungan institusional berisiko tinggi cenderung menggunakan pengungkapan non

keuangan untuk merespons tekanan eksternal, meskipun perubahan substantif dalam praktik internal belum tentu terjadi. Fenomena ini menegaskan bahwa legitimasi tidak selalu mencerminkan integritas aktual, tetapi dapat dibangun melalui narasi dan simbol yang disesuaikan dengan ekspektasi publik. Teori legitimasi juga berkaitan erat dengan dinamika globalisasi dan meningkatnya tuntutan terhadap transparansi serta tata kelola yang akuntabel. Laporan Edelman Trust Barometer (2024) menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap sektor bisnis semakin ditentukan oleh integritas, etika, dan tanggung jawab sosial perusahaan, melampaui penilaian terhadap kinerja finansial semata. Sekitar 63% responden global menyatakan bahwa kepercayaan terhadap perusahaan bergantung pada komitmen terhadap nilai sosial dan keberlanjutan. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi telah menjadi aset strategis yang memengaruhi posisi perusahaan dalam sistem ekonomi dan sosial global.

Bitektine & Haack (2015) menekankan bahwa legitimasi bersifat dinamis dan dapat terkikis ketika organisasi gagal merespons perubahan ekspektasi sosial, seperti tuntutan terhadap transparansi dan praktik antikorupsi. Kegagalan organisasi menjaga legitimasi dapat berujung pada penurunan kepercayaan publik, meningkatnya pengawasan regulator, serta berkurangnya akses terhadap sumber daya ekonomi. Temuan empiris *Transparency International* (2024) juga menunjukkan bahwa penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) di berbagai negara sering kali berkorelasi dengan melemahnya legitimasi institusi publik dan korporasi, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian, teori legitimasi memberikan landasan konseptual yang kuat untuk memahami mengapa perusahaan terdorong melakukan pengungkapan antikorupsi. Pengungkapan tersebut tidak hanya dipandang sebagai bentuk kepatuhan

regulatif, tetapi juga sebagai strategi untuk mempertahankan kesesuaian antara nilai organisasi dan ekspektasi masyarakat. Legitimasi menjadi sumber daya sosial yang tidak dapat dibeli secara instan, melainkan harus dibangun melalui konsistensi etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam jangka panjang. Penelitian ini menjadikan teori legitimasi relevan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dengan koneksi politik yang berupaya mempertahankan penerimaan sosial melalui pengungkapan antikorupsi, serta bagaimana mekanisme pengawasan internal, khususnya komite audit, berpotensi memengaruhi efektivitas strategi legitimasi tersebut.

2.1.3. Koneksi Politik

Koneksi politik menggambarkan adanya hubungan formal maupun informal antara individu dalam perusahaan dengan aktor politik atau pejabat publik yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dalam literatur tata kelola kontemporer, koneksi politik tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kepemilikan saham atau jabatan politik formal, tetapi juga mencakup keterlibatan anggota dewan atau manajemen puncak yang pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat publik, memiliki afiliasi partai politik, atau menjalin hubungan personal dengan elite kekuasaan (Ferreira et al., 2024). Hubungan tersebut berpotensi memberikan akses strategis bagi perusahaan, seperti kemudahan perizinan, peluang memperoleh proyek pemerintah, serta perlindungan regulatif, khususnya di negara berkembang dengan kualitas institusi yang relatif lemah.

Fenomena koneksi politik telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi modern dan ditemukan di berbagai konteks negara. Sejumlah penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memperoleh keuntungan ekonomi tertentu, antara lain akses pembiayaan yang lebih mudah, biaya

modal yang lebih rendah, dan peluang yang lebih besar dalam memenangkan kontrak pemerintah (Khan, 2024). Namun demikian, literatur yang sama juga menegaskan bahwa keuntungan tersebut sering kali disertai dengan konsekuensi tata kelola, berupa meningkatnya risiko inefisiensi, distorsi pengambilan keputusan, serta melemahnya mekanisme pengawasan internal perusahaan (Restuti, 2025). Di Indonesia, keterkaitan antara politik dan bisnis bukanlah fenomena yang bersifat insidental, melainkan telah mengakar secara struktural dalam praktik korporasi. Studi studi terkini menunjukkan bahwa keberadaan individu berlatar belakang politik dalam struktur dewan komisaris atau direksi masih cukup dominan pada perusahaan publik, terutama pada perusahaan besar dan perusahaan dengan keterkaitan tinggi terhadap kebijakan pemerintah (Fatawijaya et al., 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa koneksi politik telah menjadi bagian dari karakteristik tata kelola perusahaan, bukan sekadar strategi sementara. Meskipun koneksi politik kerap dipersepsikan sebagai sumber daya strategis, keberadaannya juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi.

Sejumlah bukti empiris mutakhir menunjukkan bahwa dominasi kepentingan politik dalam struktur perusahaan dapat berdampak negatif terhadap kualitas transparansi dan akuntabilitas. Rahmawati (2025) menemukan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung menyajikan narasi laporan yang lebih optimistis dan selektif, sehingga berpotensi menutupi risiko dan informasi sensitif yang relevan bagi pemangku kepentingan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Arif et al. (2024) dan Almarayeh (2025), yang menunjukkan bahwa koneksi politik berkorelasi dengan penurunan kualitas pelaporan dan meningkatnya perilaku oportunistik. Hal ini menegaskan bahwa koneksi politik merupakan pedang bermata dua yaitu di satu sisi dapat memberikan keuntungan jangka pendek bagi perusahaan, namun di sisi lain

berpotensi mengancam integritas tata kelola dan kredibilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Koneksi politik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keunggulan atau kelemahan perusahaan, melainkan sebagai kondisi struktural yang membentuk pola pengambilan keputusan dan praktik pelaporan korporasi. Dalam situasi ini, keberadaan koneksi politik cenderung meningkatkan kebutuhan akan mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya menilai keberadaan koneksi politik itu sendiri, tetapi juga menelaah bagaimana perusahaan merespons kondisi tersebut melalui struktur tata kelola dan mekanisme pengawasan yang dimilikinya.

2.1.4. Pengungkapan Anti Korupsi

Pengungkapan antikorupsi merupakan bagian integral dari pelaporan keberlanjutan yang berfungsi untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap integritas, etika bisnis, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Di lingkungan global, *Global Reporting Initiative (GRI) Standard 205: Anti-Corruption* menjadi salah satu pedoman utama yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mengidentifikasi, mengelola, dan merespons risiko korupsi dalam aktivitas operasionalnya. GRI 205 mencakup tiga aspek inti, yaitu penilaian risiko korupsi di seluruh wilayah operasi perusahaan, pelatihan dan komunikasi kebijakan antikorupsi kepada karyawan dan mitra bisnis, serta pengungkapan insiden korupsi yang terkonfirmasi beserta tindakan yang diambil perusahaan. Ketiga aspek ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai komitmen dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi risiko korupsi secara sistematis.

Isu korupsi semakin menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Laporan *Transparency International* (2024) menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden global memandang sektor swasta memiliki peran signifikan dalam memperparah atau membiarkan praktik korupsi di negaranya. Temuan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak lagi dinilai semata-mata berdasarkan kinerja finansial, tetapi juga berdasarkan integritas dan tanggung jawab etisnya. Maka dari itu, pengungkapan antikorupsi berfungsi tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar pelaporan, tetapi juga sebagai strategi legitimasi untuk mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. Perhatian terhadap pengungkapan antikorupsi semakin menguat seiring dengan diberlakukannya kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan bagi perusahaan publik sebagaimana diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017. Meskipun regulasi ini tidak secara eksplisit mewajibkan pengungkapan kebijakan antikorupsi, perusahaan didorong untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan praktik keberlanjutan, termasuk aspek tata kelola, etika bisnis, dan kepatuhan. Pada praktiknya, banyak perusahaan mengadopsi standar pelaporan internasional seperti GRI, termasuk GRI 205, sebagai acuan utama dalam menyusun laporan keberlanjutan mereka. Namun demikian, tingkat kualitas dan kedalaman pengungkapan antikorupsi masih sangat bervariasi antar perusahaan.

Sejumlah penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa pengungkapan antikorupsi sering kali bersifat tidak seragam dan cenderung simbolik, terutama di lingkungan institusional dengan risiko korupsi yang tinggi. Barros et al., (2022) menemukan bahwa peningkatan pengungkapan antikorupsi di Brasil pasca krisis legitimasi lebih banyak bersifat deklaratif dan berorientasi reputasi, tanpa diikuti oleh penguatan praktik internal yang substansial. Temuan serupa juga dilaporkan oleh

Ghazwani et al., (2023), Utami & Barokah, (2025), serta Ameraldo (2025), yang menunjukkan bahwa perusahaan di negara berkembang kerap mengungkapkan kebijakan antikorupsi secara umum, namun minim informasi terkait implementasi, pelatihan, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan tindak lanjut kasus. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa pengungkapan antikorupsi sering digunakan sebagai alat legitimasi simbolik untuk merespons tekanan eksternal, seperti tuntutan regulator dan investor internasional, dibandingkan sebagai cerminan integrasi etika yang substantif dalam tata kelola perusahaan.

Dengan demikian, pengungkapan antikorupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai indikator kepatuhan formal terhadap standar pelaporan, melainkan sebagai refleksi dari pola respons perusahaan terhadap tekanan legitimasi dan ekspektasi pemangku kepentingan. Perbedaan tingkat dan kualitas pengungkapan antikorupsi mencerminkan variasi komitmen perusahaan dalam menginternalisasi prinsip integritas dan tata kelola yang baik. Pada penelitian ini, pengungkapan antikorupsi dipandang sebagai representasi pola transparansi perusahaan, yang relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan koneksi politik dan efektivitas mekanisme pengawasan internal, khususnya peran komite audit.

2.1.5. Komite Audit

Komite audit merupakan komponen kunci dalam struktur tata kelola perusahaan yang berfungsi membantu dewan komisaris dalam memastikan integritas pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Di Indonesia, keberadaan komite audit diatur secara formal melalui POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mewajibkan setiap perusahaan publik memiliki komite audit dengan minimal tiga anggota, di mana

setidaknya satu anggota berasal dari komisaris independen. Regulasi ini mencerminkan pengakuan regulator bahwa mekanisme pengawasan internal diperlukan untuk menjembatani potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik modal, terutama dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan dan operasional yang kompleks.

Literatur tata kelola perusahaan secara konsisten menunjukkan bahwa karakteristik komite audit memengaruhi kualitas pengawasan dan pelaporan perusahaan. Penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa tingkat independensi komite audit berperan penting dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan, memperbaiki kualitas pelaporan keuangan, serta membatasi perilaku oportunistik manajemen. Namun, efektivitas komite audit dalam meningkatkan kualitas pengawasan tetap menjadi tantangan, khususnya dalam lingkungan perusahaan yang memiliki kompleksitas tata kelola yang tinggi (Salameh Alkhazaleh et al., 2024). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Tessema (2025) yang menunjukkan bahwa aktivitas komite audit termasuk frekuensi rapat dan kompetensi anggota berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan keandalan pelaporan non-keuangan. Dengan demikian, komite audit tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap struktural, tetapi sebagai mekanisme substantif dalam menjaga akuntabilitas perusahaan. Efektivitas komite audit masih menjadi tantangan. Meskipun pembentukan komite audit telah menjadi kewajiban formal, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Survei Indonesia *Institute for Corporate Directorship* (IICD, 2022) menunjukkan bahwa sekitar 42% perusahaan publik belum memiliki komite audit dengan anggota yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan yang memadai. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kemampuan komite audit dalam menilai risiko pelaporan, mengevaluasi hasil audit internal, serta mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan etika dan

antikorupsi. Selain itu, keterbatasan independensi anggota komite audit dan minimnya evaluasi atas efektivitas kerja audit internal juga sering dilaporkan sebagai faktor yang menghambat peran pengawasan komite audit di perusahaan Indonesia.

Perkembangan praktik tata kelola dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa peran komite audit mengalami perluasan yang signifikan. Komite audit tidak lagi terbatas pada pengawasan laporan keuangan, tetapi juga mencakup isu tata kelola, kepatuhan, etika bisnis, dan keberlanjutan. Laporan PwC *Global Audit Committee Survey* (2023) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% perusahaan besar di kawasan Asia telah memperluas mandat komite audit untuk mengawasi risiko non-keuangan, termasuk risiko korupsi dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa komite audit semakin diposisikan sebagai garda depan dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola dan integritas tidak hanya dinyatakan secara formal dalam kebijakan perusahaan, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik operasional sehari-hari.

Dalam kerangka tersebut, komite audit memegang peran strategis dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan tuntutan transparansi publik. Efektivitas komite audit menjadi sangat krusial, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan dengan risiko tata kelola tinggi. Oleh karena itu, keberadaan komite audit yang independen, kompeten, dan aktif tidak hanya menjadi syarat kepatuhan regulatif, tetapi juga faktor penentu dalam menjaga integritas organisasi dan kualitas pengungkapan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik komite audit, seperti jumlah anggota, keahlian, dan frekuensi rapat, diduga memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas pengungkapan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan antikorupsi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini komite audit diposisikan sebagai

variabel independen yang diharapkan dapat menjelaskan variasi tingkat pengungkapan antikorupsi perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan antikorupsi dan tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa praktik transparansi tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional dan struktur kekuasaan yang melingkupi perusahaan. Salah satu faktor yang banyak dikaji dalam literatur adalah keberadaan koneksi politik, yang terbukti memiliki implikasi penting terhadap perilaku pelaporan perusahaan.

Barros et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung melakukan pengungkapan antikorupsi yang bersifat simbolik sebagai strategi mempertahankan legitimasi publik, tanpa diikuti oleh praktik substantif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ferreira et al. (2024) yang menegaskan bahwa koneksi politik yang melekat pada anggota dewan memengaruhi praktik tata kelola dan proses pengambilan keputusan perusahaan. Kedua studi tersebut memperlihatkan bahwa koneksi politik dapat mengurangi tekanan eksternal terhadap perusahaan, sehingga transparansi tidak selalu menjadi prioritas utama. Dari sisi tata kelola, Utami & Barokah (2025) menemukan bahwa mekanisme governance yang kuat, seperti struktur pengawasan yang efektif, berperan dalam meningkatkan tingkat pengungkapan antikorupsi. Hasil serupa ditunjukkan oleh Ghazwani et al. (2023) yang menegaskan bahwa kualitas tata kelola perusahaan berkontribusi terhadap kedalaman dan kualitas pengungkapan antikorupsi. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pengungkapan antikorupsi tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan legitimasi, tetapi juga oleh kapasitas pengawasan internal perusahaan.

Konteks sektoral juga menjadi perhatian penting. Mehadi & Mazumder (2024) menunjukkan bahwa di sektor keuangan, yang berada di bawah pengawasan regulatif ketat, karakteristik pengawasan internal memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hal ini menegaskan bahwa tekanan regulasi dan struktur tata kelola yang seragam memperkuat relevansi pengujian pengungkapan antikorupsi pada sektor-sektor tertentu. Dari perspektif legitimasi, Landis & Paglietti (2025) menekankan bahwa pengungkapan antikorupsi sering digunakan sebagai alat untuk mempertahankan penerimaan sosial perusahaan, khususnya di lingkungan institusional dengan risiko korupsi yang tinggi. Namun, legitimasi yang dibangun melalui pengungkapan tidak selalu mencerminkan praktik yang substantif, terutama ketika mekanisme pengawasan internal tidak cukup kuat.

Berdasarkan enam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koneksi politik cenderung melemahkan kualitas pengungkapan antikorupsi, sementara tata kelola perusahaan berpotensi meningkatkan transparansi. Namun, literatur yang ada masih terbatas dalam mengkaji pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi secara langsung, khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menguji secara empiris pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi pada perusahaan sektor manufaktur dan keuangan di Indonesia. Ringkasan penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil
----------	---------------------	-------

Barros et al. (2022)	Koneksi Politik & Pengungkapan Antikorupsi	Koneksi politik mendorong perusahaan melakukan pengungkapan antikorupsi yang bersifat simbolik untuk mempertahankan legitimasi, bukan substantif.
Ferreira et al. (2024)	Koneksi Politik & Karakteristik Dewan	Koneksi politik yang berasal dari anggota dewan memengaruhi praktik tata kelola dan pola pengambilan keputusan perusahaan.
Utami & Barokah (2025)	Tata Kelola & Pengungkapan Antikorupsi	Mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan antikorupsi.
Ghazwani et al. (2023)	Corporate Governance & Anti-Corruption Disclosure	Struktur dan efektivitas tata kelola perusahaan meningkatkan kualitas dan kedalaman pengungkapan antikorupsi.
Mehadi & Mazumder (2024)	Tata Kelola & Pengungkapan Antikorupsi (Sektor Keuangan)	Karakteristik pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi di sektor perbankan.
Landis & Paglietti (2025)	Legitimasi & Pengungkapan Antikorupsi	Pengungkapan antikorupsi digunakan sebagai strategi legitimasi di lingkungan institusional dengan risiko korupsi tinggi.

2.3. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.1. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Agency theory memberikan perspektif bahwa koneksi politik menciptakan bentuk konflik kepentingan yang lebih kompleks karena individu yang memiliki relasi dengan aktor politik membawa kepentingan non-ekonomis ke dalam pengambilan

keputusan perusahaan. Relasi tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh perlindungan regulatif dan akses kebijakan yang mengurangi tekanan pengawasan eksternal, sehingga manajemen memiliki insentif lebih kecil untuk bersikap transparan. Argumen ini sejalan dengan temuan klasik Faccio (2006) yang menunjukkan bahwa perusahaan berpolitik cenderung memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah, yang pada gilirannya melemahkan mekanisme disiplin pasar. Perlindungan politik tersebut berdampak langsung pada perilaku pengungkapan. Ketika risiko sanksi dan intervensi regulator menurun, biaya ekonomi dan politik dari keterbukaan informasi justru meningkat, terutama jika pengungkapan tersebut berpotensi mengungkap kelemahan tata kelola atau risiko korupsi. Perusahaan berpolitik memiliki kecenderungan untuk membatasi pengungkapan antikorupsi agar tidak mengganggu stabilitas relasi politik yang menguntungkan. Ferreira et al. (2024) mendukung argumen ini dengan menunjukkan bahwa koneksi politik yang berasal dari anggota dewan memengaruhi praktik tata kelola dan pola pengambilan keputusan perusahaan.

Menurut sudut pandang *legitimacy theory*, perusahaan yang memiliki koneksi politik menghadapi dilema antara mempertahankan legitimasi publik dan menjaga hubungan strategis dengan aktor politik. Untuk mengelola dilema tersebut, perusahaan cenderung memilih strategi *symbolic disclosure*, yaitu melakukan pengungkapan antikorupsi secara formal dan terbatas guna memenuhi ekspektasi minimum pemangku kepentingan tanpa menunjukkan komitmen substantif. Barros et al. (2022) menunjukkan bahwa perusahaan berpolitik di Brasil meningkatkan pengungkapan antikorupsi setelah tekanan publik, namun pengungkapan tersebut bersifat dangkal dan tidak mencerminkan praktik pengendalian yang nyata. Kondisi ini menjadi semakin relevan dengan risiko korupsi yang tinggi. *Transparency International* (2024) menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi Indonesia masih berada pada kategori

rawan, yang menandakan lemahnya kepercayaan publik terhadap integritas institusi. Dalam lingkungan seperti ini, perusahaan berpolitik memiliki insentif lebih besar untuk menghindari pengungkapan antikorupsi yang mendalam karena keterbukaan tersebut dapat meningkatkan eksposur reputasi dan risiko politik. Dengan demikian, koneksi politik tidak hanya melemahkan dorongan untuk transparansi melalui mekanisme perlindungan politik, tetapi juga mendorong penggunaan pengungkapan antikorupsi sebagai alat legitimasi simbolik.

Berdasarkan argumentasi tersebut, baik *agency theory* maupun *legitimacy theory* memberikan dasar teoretis yang konsisten bahwa koneksi politik cenderung menurunkan peluang perusahaan untuk melakukan pengungkapan antikorupsi secara substantif. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan antikorupsi

2.3.2. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Agency theory menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*). Pada kondisi ini, komite audit berperan sebagai mekanisme tata kelola yang bertugas memastikan kualitas pelaporan serta meminimalkan asimetri informasi. Ukuran komite audit mencerminkan kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan. Komite audit dengan jumlah anggota yang lebih besar memiliki sumber daya yang lebih memadai dalam menjalankan fungsi monitoring, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun keragaman perspektif, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan transparansi pelaporan. Ukuran komite audit yang lebih besar juga memungkinkan perusahaan memperoleh akses terhadap sumber daya yang lebih luas, termasuk keahlian profesional dan jaringan informasi yang relevan. Keberagaman latar belakang anggota

komite audit dapat meningkatkan kualitas diskusi dan pengambilan keputusan dalam proses pengawasan, sehingga mendorong peningkatan kualitas pengungkapan perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran komite audit berkontribusi dalam mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaporan perusahaan.

Kesadaran regulator terhadap pentingnya ukuran komite audit tercermin dalam POJK No. 55/POJK.04/2015 yang mensyaratkan minimal tiga anggota komite audit. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang memadai diperlukan untuk mendukung efektivitas fungsi pengawasan, terutama pada perusahaan dengan kompleksitas operasional yang tinggi. Semakin besar ukuran komite audit, semakin besar pula kapasitas perusahaan dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal serta praktik pelaporan keuangan dan non-keuangan. Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan, khususnya dalam konteks pelaporan keberlanjutan dan non-keuangan. Raimo et al. (2020) menemukan bahwa karakteristik komite audit, termasuk ukuran, berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaporan terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan serta yang menunjukkan bahwa atribut komite audit memiliki peran penting dalam meningkatkan pengungkapan *sustainability report*. Selain itu, penelitian di Indonesia juga menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability reporting*, yang mencerminkan peningkatan transparansi perusahaan.

Pada perusahaan di Indonesia, ukuran komite audit yang lebih besar memungkinkan pembagian tugas yang lebih efektif serta meningkatkan intensitas pengawasan terhadap proses pelaporan. Dengan adanya lebih banyak anggota, komite

audit dapat melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan internal, sistem pengendalian, serta implementasi program antikorupsi. Selain itu, ukuran komite audit yang memadai juga dapat mengurangi dominasi individu tertentu dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan objektivitas pengawasan. Menurut *legitimacy theory*, perusahaan memiliki dorongan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Komite audit yang berukuran lebih besar dapat memperkuat tekanan internal bagi perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara lebih luas, termasuk dalam aspek antikorupsi (Pramita & Budiasih, 2025). Banyaknya anggota dalam komite audit memungkinkan adanya kontrol sosial internal yang lebih kuat, sehingga perusahaan terdorong untuk tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga membangun legitimasi melalui praktik pelaporan yang lebih terbuka.

Dengan demikian, ukuran komite audit tidak hanya mencerminkan struktur formal tata kelola perusahaan, tetapi juga menjadi indikator kapasitas pengawasan yang dapat memengaruhi kualitas pengungkapan. Semakin besar ukuran komite audit, semakin besar pula potensi perusahaan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pengungkapan, termasuk dalam pengungkapan antikorupsi (Aprianti *et al.*, 2022). Oleh karena itu, dibuat hipotesis sebagai berikut.

H2: Ukuran anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi.

2.3.3. Pengaruh Kompetensi/Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Kompetensi komite audit, terutama yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan audit, merupakan faktor krusial dalam mengatasi konflik kepentingan menurut

agency theory. Anggota komite audit yang memiliki kemampuan teknis yang kuat dapat mengidentifikasi celah dalam laporan, memahami pola pelaporan yang tidak wajar, serta menolak informasi yang bersifat manipulatif. Data OJK (2023) menunjukkan bahwa masih ada lebih dari 40% perusahaan publik yang komite auditnya tidak sepenuhnya beranggotakan ahli keuangan, sehingga kemampuan pengawasan menjadi kurang optimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan kualitas pengawasan internal yang lebih baik cenderung memiliki tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam pengungkapan. Komite audit dengan anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi memiliki kapasitas yang lebih baik dalam memastikan kualitas pelaporan serta kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan temuan (Masud *et al.*, 2019). Selain itu, Salihu (2025) menemukan bahwa kompetensi pengawasan internal berkontribusi dalam menekan perilaku oportunistik serta meningkatkan transparansi pengungkapan sebagai bagian dari mekanisme pencegahan fraud dan korupsi. Temuan lain juga menunjukkan bahwa karakteristik komite audit, termasuk kompetensi, memiliki hubungan positif dengan kualitas pengungkapan non-keuangan dan *sustainability reporting* (Aprianti *et al.*, 2022). Komite audit yang memiliki keahlian yang memadai mampu melakukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap kebijakan perusahaan, sistem pengendalian internal, serta praktik pelaporan, sehingga meningkatkan kualitas informasi yang diungkapkan kepada publik.

Dalam perspektif *legitimacy theory*, kompetensi komite audit juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memperoleh legitimasi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Komite audit yang kompeten cenderung tidak hanya menerima informasi secara formal, tetapi juga melakukan evaluasi kritis terhadap kualitas dan kelengkapan pengungkapan. Hal ini mendorong perusahaan untuk tidak

sekadar melakukan pengungkapan simbolik, melainkan menyajikan informasi yang lebih komprehensif dan relevan terkait kebijakan dan praktik antikorupsi. Peningkatan kompetensi komite audit menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas tata kelola perusahaan. Komite audit yang memiliki keahlian yang memadai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, kebijakan kepatuhan, serta implementasi program antikorupsi (Raimo *et al.*, 2020). Dengan demikian, kompetensi komite audit diharapkan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengungkapan antikorupsi perusahaan. Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H3: Kompetensi/keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi.

2.3.4. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas dan keseriusan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Dalam perspektif *agency theory*, rapat yang dilakukan secara lebih rutin memungkinkan komite audit untuk melakukan monitoring berkelanjutan, mendiskusikan temuan audit secara tepat waktu, serta merespons potensi masalah tata kelola sebelum berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius. Mekanisme ini menjadi krusial pada perusahaan dengan kompleksitas operasional dan resiko tata kelola yang tinggi, karena memungkinkan pengawasan yang lebih konsisten terhadap proses pelaporan dan kepatuhan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa intensitas aktivitas komite audit, termasuk frekuensi rapat, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan kualitas pelaporan perusahaan. Komite audit yang aktif melakukan rapat cenderung memiliki kapasitas monitoring yang lebih kuat, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan

kualitas pengungkapan, khususnya pada perusahaan dengan kompleksitas operasional dan tekanan eksternal yang tinggi (Salameh Alkhazaleh *et al.*, 2024). Selain itu, penguatan mekanisme pengawasan melalui aktivitas komite audit dan praktik pengungkapan perusahaan juga berkontribusi dalam menekan risiko perilaku oportunistik serta meningkatkan transparansi non-keuangan sebagai bagian dari upaya pencegahan fraud dan korupsi (Salihu, 2025).

Peran frekuensi rapat menjadi semakin relevan. Data Bursa Efek Indonesia (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan publik melaksanakan minimal empat rapat komite audit per tahun, namun terdapat variasi intensitas rapat antar perusahaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak semua perusahaan memiliki tingkat pengawasan internal yang sama. Komite audit yang lebih sering melakukan rapat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kualitas evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, kebijakan kepatuhan, serta praktik pelaporan perusahaan, sehingga mendorong pengungkapan yang lebih transparan dan berkualitas. Menurut sudut pandang *legitimacy theory*, frekuensi rapat yang lebih tinggi menciptakan tekanan internal bagi manajemen untuk mempertahankan citra dan legitimasi perusahaan melalui praktik transparansi yang lebih konsisten. Evaluasi yang berulang dan terdokumentasi memperkecil kemungkinan perusahaan hanya melakukan *symbolic disclosure* dan mendorong pergeseran ke arah *substantive disclosure*. Dengan demikian, semakin tinggi frekuensi rapat komite audit, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan non keuangan, termasuk dalam pengungkapan antikorupsi (Pramita & Budiasih, 2025). Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut.

H4: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi.

2.4. Kerangka Pemikiran

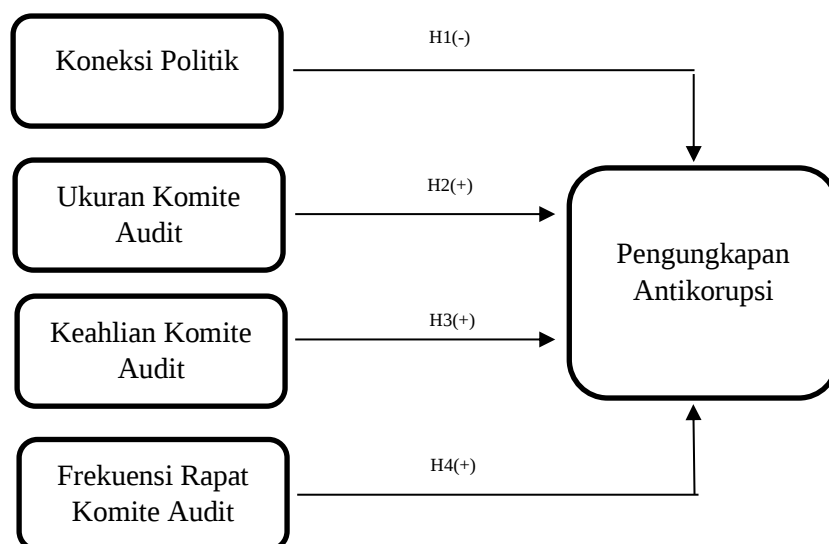
Berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh kerangka pemikiran yang disusun pada *Gambar 2.1*. Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengungkapan antikorupsi. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari koneksi politik serta karakteristik komite audit, yang diharapkan dapat menjelaskan variasi tingkat pengungkapan antikorupsi perusahaan. Koneksi politik diposisikan sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi tingkat transparansi perusahaan. Dalam berbagai literatur, koneksi politik sering dikaitkan dengan potensi menurunnya kualitas pengungkapan akibat adanya kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaporan. Oleh karena itu, pengujian pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan antikorupsi menjadi penting untuk memahami bagaimana hubungan antara relasi politik dan transparansi perusahaan.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji karakteristik komite audit sebagai mekanisme tata kelola internal yang berperan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pelaporan perusahaan. Komite audit direpresentasikan melalui beberapa karakteristik utama yang diatur dalam POJK No. 55/POJK.04/2015, yaitu ukuran komite audit (jumlah anggota), kompetensi atau keahlian anggota (terutama dalam bidang akuntansi dan keuangan), serta frekuensi rapat komite audit. Di samping itu, independensi komite audit tetap menjadi prinsip penting dalam tata kelola perusahaan, karena independensi mencerminkan objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan, meskipun dalam penelitian ini tidak diuji secara empiris sebagai

variabel utama. Ukuran komite audit mencerminkan kapasitas sumber daya pengawasan yang dimiliki perusahaan, kompetensi anggota mencerminkan kualitas pengawasan dari sisi keahlian teknis, sedangkan frekuensi rapat mencerminkan intensitas aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketiga aspek tersebut secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi komite audit dalam memastikan kualitas pelaporan dan transparansi perusahaan, termasuk dalam pengungkapan antikorupsi.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan bahwa pengungkapan antikorupsi dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa koneksi politik serta faktor internal berupa karakteristik komite audit. Hubungan tersebut diuji secara langsung untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel berkontribusi terhadap peningkatan transparansi perusahaan dalam mengungkapkan praktik dan kebijakan antikorupsi.

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal (*causal research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu pengungkapan antikorupsi yang diukur menggunakan standar GRI 205. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari koneksi politik serta karakteristik komite audit, yang meliputi ukuran, kompetensi/keahlian, dan frekuensi rapat. Penelitian ini bersifat *explanatory research* karena berfokus pada pengujian hipotesis dan penjelasan hubungan antarvariabel berdasarkan landasan teori dan bukti empiris. Penelitian ini menggunakan data panel yang menggabungkan data lintas perusahaan (*cross-section*) dan data runtut waktu (*time series*) selama periode 2020–2024. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk menangkap variasi karakteristik antar perusahaan serta perubahan perilaku perusahaan antar waktu secara simultan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengungkapan antikorupsi perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat unbalanced panel, yang mencerminkan kondisi empiris ketersediaan laporan perusahaan selama periode pengamatan. Variabel dependen diukur menggunakan indeks pengungkapan antikorupsi dan diperlakukan sebagai variabel kontinu. Sementara itu, variabel independen diukur berdasarkan indikator yang telah ditentukan sesuai dengan karakteristik masing-masing variabel. Untuk menganalisis hubungan antarvariabel, penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit terhadap

pengungkapan antikorupsi perusahaan secara simultan. Pendekatan ini memungkinkan estimasi yang lebih efisien karena mempertimbangkan dimensi waktu dan individu dalam data, serta mampu mengendalikan heterogenitas yang tidak teramati antar perusahaan.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode antara 2020–2024. Sejalan dengan fokus penelitian pada koneksi politik dan karakteristik komite audit serta pengungkapan antikorupsi dalam kerangka tata kelola perusahaan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada sektor manufaktur dan sektor keuangan. Pembatasan sektor ini dilakukan karena kedua sektor tersebut memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi dengan kebijakan pemerintah, regulasi publik, serta pengawasan institusional, sehingga relevan untuk mengkaji hubungan antara koneksi politik, karakteristik komite audit, dan pengungkapan antikorupsi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang disederhanakan untuk menjaga kecukupan jumlah observasi. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan antara 2020 –2024.
2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan atau laporan keberlanjutan serta laporan keuangan yang dapat diakses publik selama periode pengamatan.
3. Data yang tersedia memungkinkan pengukuran variabel penelitian, yaitu pengungkapan antikorupsi, koneksi politik, dan karakteristik komite audit.

Penelitian ini menggunakan data panel yang bersifat *unbalanced*, karena tidak seluruh perusahaan memiliki data yang lengkap untuk setiap tahun pengamatan. Penggunaan *unbalanced panel data* mencerminkan kondisi empiris ketersediaan informasi perusahaan dan memungkinkan peneliti untuk memaksimalkan jumlah sampel tanpa mengeluarkan perusahaan yang hanya memiliki data parsial. Setiap perusahaan yang memenuhi kriteria akan menjadi unit observasi pada tahun-tahun di mana data tersedia selama periode 2020–2024, sehingga jumlah observasi panel ditentukan oleh ketersediaan data aktual.

3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber resmi dan dapat diakses publik. Data sekunder dipilih karena menyediakan informasi historis yang objektif, terdokumentasi, dan terverifikasi mengenai kondisi serta praktik tata kelola perusahaan, sehingga sesuai untuk tujuan pengujian hubungan antarvariabel dalam penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, laporan tahunan (*annual report*), laporan keberlanjutan (*sustainability report*), dan laporan keuangan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi masing-masing emiten serta situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta sumber publik yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan menelaah laporan-laporan perusahaan, mengidentifikasi dan mencatat informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian, serta melakukan proses pengodean data. Selanjutnya, data yang telah dikodekan diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik Stata versi 17.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1. Variabel Dependen

Pengungkapan antikorupsi (PAC) berfungsi sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel ini merefleksikan sejauh mana perusahaan mengkomunikasikan kebijakan, upaya, dan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran pengungkapan antikorupsi mengacu pada standar *Global Reporting Initiative (GRI) 205: Anti-Corruption*, yang merupakan pedoman internasional dalam menilai transparansi dan integritas praktik bisnis perusahaan. Dalam penelitian ini, pengungkapan antikorupsi diukur menggunakan pendekatan agregat, yaitu dengan memfokuskan pengukuran pada keberadaan pengungkapan atas tiga elemen inti GRI 205, tanpa menurunkan penilaian hingga pada tingkat item teknis di masing-masing indikator. Pendekatan ini secara eksplisit mengacu pada penelitian Chouaibi et al. (2025), yang menggunakan pengukuran agregat GRI 205 untuk menilai komitmen antikorupsi perusahaan secara keseluruhan. Pendekatan agregat dipilih karena bertujuan menangkap orientasi kebijakan dan komitmen strategis perusahaan terhadap antikorupsi, bukan sekadar kelengkapan administratif pengungkapan. Adapun tiga indikator utama GRI 205 yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. GRI 205-1: Penilaian risiko korupsi di seluruh wilayah operasi perusahaan.
2. GRI 205-2: Pelatihan dan komunikasi kebijakan antikorupsi kepada pegawai dan mitra bisnis.
3. GRI 205-3: Pelaporan kasus korupsi dan tindakan yang diambil perusahaan.

Pendekatan agregat ini dipilih untuk menjaga konsistensi pengukuran dalam penelitian kuantitatif berbasis data panel serta menghindari subjektivitas penilaian yang

berpotensi muncul apabila pengukuran dilakukan pada tingkat item yang sangat rinci. Sementara itu, penelitian sebelumnya seperti Previtali & Cerchiello (2023) serta Jannah & Adhariani (2021) menjadi rujukan konseptual dalam penggunaan GRI 205 sebagai dasar pengukuran pengungkapan antikorupsi, meskipun keduanya menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih rinci. Dengan demikian, penelitian ini mengambil posisi metodologis yang berbeda melalui penggunaan pendekatan agregat, sesuai dengan tujuan analisis kuantitatif dan keterbatasan data panel yang digunakan. Secara sistematis pengukuran pengungkapan antikorupsi dirumuskan sebagai berikut:

$$PAC = \frac{\sum_{i=1}^3 \text{Skor GRI 205}_i}{3}$$

Dengan:

Skor GRI 205_i = 1 jika indikator ke-*i* diungkapkan.

Skor GRI 205_i = 0 jika indikator ke-*i* tidak diungkapkan.

Setiap perusahaan dievaluasi berdasarkan apakah masing-masing indikator tersebut diungkapkan secara eksplisit dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan. Untuk setiap indikator yang diungkapkan, perusahaan diberikan skor 1, dan skor 0 apabila indikator tersebut tidak diungkapkan. Total skor kemudian dibagi dengan jumlah indikator GRI 205, sehingga menghasilkan nilai indeks pengungkapan antikorupsi dengan rentang 0 hingga 1.

3.4.2. Variabel Independen

3.4.2.1. Koneksi Politik (KOP)

Koneksi politik merupakan variabel independen dalam penelitian ini. Secara konseptual, koneksi politik merujuk pada keterhubungan antara perusahaan dengan

aktor politik melalui individu yang memiliki posisi strategis dalam struktur pengawasan perusahaan. Penelitian ini secara khusus memfokuskan pengukuran koneksi politik pada dewan komisaris, karena dewan komisaris memiliki peran sentral dalam fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Pengaruh politik yang melekat pada organ pengawasan dinilai memiliki implikasi yang lebih kuat terhadap tata kelola perusahaan dan kebijakan pengungkapan dibandingkan pengaruh yang bersifat operasional, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks transparansi dan pengungkapan antikorupsi (Candra & Joni, 2025). Koneksi politik diidentifikasi berdasarkan latar belakang anggota dewan komisaris yang memiliki pengalaman atau afiliasi politik, seperti pernah menjabat sebagai pejabat publik (anggota legislatif, menteri, kepala daerah, atau pejabat tinggi negara), ataupun keterlibatan dalam struktur pemerintahan, dan memiliki hubungan keluarga dekat dengan aktor politik aktif. Pendekatan identifikasi ini sejalan dengan temuan Fatawijaya et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keterlibatan aktor politik dalam struktur dewan komisaris merupakan indikator utama koneksi politik yang relevan dalam konteks tata kelola perusahaan di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pengukuran koneksi politik dilakukan menggunakan pendekatan proporsional, yaitu dengan menghitung persentase anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang politik terhadap total jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap intensitas keterlibatan politik dalam struktur pengawasan perusahaan secara lebih akurat. Secara matematis, pengukuran koneksi politik dirumuskan sebagai berikut:

$$KOP = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris berlatar belakang politik}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

Nilai variabel koneksi politik berada pada rentang 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin tingginya intensitas koneksi politik dalam struktur dewan komisaris perusahaan, sedangkan nilai yang mendekati 0 mencerminkan rendahnya keterlibatan aktor politik dalam fungsi pengawasan perusahaan. Dengan demikian, pengukuran berbasis proporsi ini memungkinkan analisis yang lebih sensitif terhadap derajat koneksi politik dan relevan untuk menguji pengaruhnya terhadap pengungkapan antikorupsi dalam kerangka regresi data panel.

1.4.2.2. Ukuran Komite Audit (UKA)

Ukuran komite audit merupakan salah satu karakteristik komite audit sesuai yang diatur dalam POJK. Komite audit dengan jumlah anggota yang lebih besar diasumsikan memiliki sumber daya dan keberagaman pandangan yang lebih memadai untuk mengawasi manajemen, termasuk dalam isu transparansi dan pengungkapan antikorupsi. Namun demikian, ukuran yang terlalu besar juga berpotensi menimbulkan inefisiensi koordinasi. Berdasarkan ketentuan OJK, jumlah minimal anggota komite audit adalah tiga orang. Ukuran komite audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit yang tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Pendekatan ini umum digunakan dalam penelitian tata kelola dan pengungkapan (Raimo et al., 2020).

$$UKA = \text{Jumlah anggota komite audit}$$

1.4.2.3. Kompetensi/Keahlian Anggota (KKA)

Kompetensi atau keahlian anggota komite audit, khususnya di bidang akuntansi dan keuangan, menentukan kemampuan komite audit dalam memahami laporan keuangan, mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendeteksi potensi kecurangan dan praktik tidak transparan. Keahlian ini menjadi penting dalam konteks

pengungkapan antikorupsi yang menuntut pemahaman teknis dan penilaian profesional. Kompetensi komite audit diukur menggunakan pendekatan proporsional, yaitu persentase anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman profesional di bidang akuntansi, keuangan, atau audit terhadap total anggota komite audit. Pendekatan pengukuran ini sejalan dengan penelitian Appuhami & Tashakor (2016) yang menggunakan keahlian keuangan anggota komite audit sebagai proksi utama kompetensi komite audit dalam menjelaskan efektivitas pengawasan dan kualitas pengungkapan non-keuangan perusahaan.

$$KKA = \frac{\text{Jumlah anggota komite audit berlatar belakang akuntansi/keuangan}}{\text{Total anggota komite audit}}$$

1.4.2.4. Frekuensi Rapat Komite Audit (FRK)

Frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas aktivitas pengawasan yang dilakukan selama satu tahun. Rapat yang diselenggarakan secara rutin menunjukkan tingkat keterlibatan komite audit dalam membahas kebijakan internal, mengevaluasi risiko, serta menindaklanjuti hasil audit. Frekuensi rapat yang lebih tinggi diasosiasikan dengan komitmen pengawasan yang lebih kuat dan peningkatan kualitas pengungkapan non-keuangan. Frekuensi rapat komite audit diukur berdasarkan jumlah rapat komite audit yang dilaksanakan dalam satu tahun buku sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan perusahaan. Pengukuran ini banyak digunakan dalam penelitian terkait tata kelola dan pengungkapan (Raimo et al., 2020).

$$FRK = \text{Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun}$$

3.4.3. Variabel Kontrol

Untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat, penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yang secara teoritis dan empiris berpotensi memengaruhi tingkat pengungkapan antikorupsi perusahaan, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Ketiga variabel ini dimasukkan untuk memastikan bahwa pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit dapat diamati secara lebih murni, tanpa bias dari karakteristik keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasi dan tingkat eksposur perusahaan terhadap publik, sehingga perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk melakukan pengungkapan. Profitabilitas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan, yang dapat memengaruhi kemampuan dan insentif perusahaan dalam melakukan pengungkapan. Sementara itu, *leverage* mencerminkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal, yang dapat meningkatkan kebutuhan transparansi untuk memenuhi kepentingan kreditur. Dengan memasukkan variabel kontrol tersebut, model penelitian diharapkan mampu memberikan estimasi yang lebih akurat dalam menjelaskan pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi perusahaan.

A. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan tingkat eksposur perusahaan terhadap pengawasan publik. Perusahaan dengan ukuran lebih besar umumnya berada di bawah sorotan yang lebih tinggi dari regulator, investor, dan masyarakat, sehingga memiliki insentif lebih kuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam pengungkapan antikorupsi. Selain itu, perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menyusun laporan

keberlanjutan yang komprehensif. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset ($\ln$ Total Aset), sebagaimana umum digunakan dalam penelitian pengungkapan dan tata kelola perusahaan (Utami & Barokah, 2024).

$$\text{Firm Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

B. Profitabilitas (*Return on Assets* / ROA)

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik cenderung ingin menjaga reputasi dan legitimasi di mata pemangku kepentingan, sehingga lebih terdorong untuk mengungkapkan informasi yang mencerminkan komitmen terhadap etika dan tata kelola yang baik. Dalam konteks pengungkapan antikorupsi, profitabilitas yang tinggi dapat memperkuat dorongan perusahaan untuk menunjukkan integritas dan kepatuhan. Profitabilitas diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yaitu rasio laba bersih terhadap total aset, sebagaimana digunakan dalam studi pengungkapan keberlanjutan (Mehadi & Mazumder, 2024).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

C. Leverage (*Debt to Assets Ratio*)

Leverage menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menghadapi tekanan lebih besar dari kreditur untuk menjaga transparansi dan mengurangi risiko, termasuk risiko yang berkaitan dengan korupsi dan tata kelola yang lemah. Kreditur cenderung menuntut kualitas pelaporan yang lebih baik untuk melindungi kepentingan mereka. Oleh karena itu, *leverage* dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi tingkat

pengungkapan antikorupsi. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Assets Ratio*, yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset (Ghazwani et al., 2023).

$$Leverage = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Berdasarkan definisi variabel-variabel di atas, pengukuran masing-masing variabel disusun dan diringkas pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Rumus	Sumber Data
Variabel Dependen Pengungkapan Antikorupsi (y)	Indeks Pengungkapan Antikorupsi GRI 205	PAC = Jumlah Elemen GRI 205 / 3	Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>)
Variabel Independen Koneksi politik (x1) Ukuran Komite Audit (x2) Keahlian Komite Audit (x3) Frekuensi Rapat (x4)	Proporsi Komisaris Independen berlatar belakang politik; Jumlah Anggota Komite Audit; Anggota Komite Audit Berlatar Akuntansi /Keuangan/Audit; Intensitas Rapat Komite Audit dalam Satu Tahun.	KOP = Dewan Komisaris dengan Latar Belakang politik / Total Dewan Komisaris; UKA = Total anggota; KKA = Anggota Ahli / Total Anggota; FRK = Jumlah Rapat.	Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>)
Variabel Kontrol <i>Firm Size</i> <i>Profitabilitas</i> <i>Leverage</i>	Skala Perusahaan; Kinerja Keuangan Perusahaan; Tingkat Ketergantungan Utang.	FSZ = In(Total Aset); ROA = Laba Bersih/Total Aset; LEV = Total Liabilitas/Total Aset	Laporan Keuangan (<i>Financial Statement</i>)

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi data panel, mengingat data yang digunakan merupakan gabungan antara data *cross section* (perusahaan) dan *time series* (periode 2020–2024). Pendekatan ini digunakan karena mampu menangkap variasi karakteristik antar perusahaan serta perubahan antar waktu secara simultan. Regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi. Karakteristik komite audit dalam penelitian ini meliputi jumlah anggota komite audit, kompetensi atau keahlian anggota, serta frekuensi rapat komite audit. Dengan demikian, model penelitian digunakan untuk menguji hipotesis H1 sampai dengan H4 secara langsung. Dalam proses estimasi, digunakan beberapa pendekatan model regresi data panel, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), untuk menentukan model yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui serangkaian uji, seperti uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Variabel kontrol yang digunakan dalam model penelitian ini meliputi ukuran perusahaan (*firm size*), leverage, dan profitabilitas, yang dimasukkan untuk mengendalikan pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel utama penelitian yang berpotensi memengaruhi tingkat pengungkapan antikorupsi perusahaan.

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai karakteristik data penelitian. Statistik ini meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari setiap variabel yang

diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan sebaran data, mengidentifikasi pola umum, dan mendeteksi adanya nilai ekstrem yang berpotensi memengaruhi hasil analisis regresi. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh pemahaman awal mengenai pengungkapan antikorupsi, keberadaan koneksi politik, karakteristik komite audit, serta kondisi variabel kontrol seperti *leverage*, *profitabilitas*, dan ukuran perusahaan selama periode 2020–2024. Hasil analisis ini membantu memastikan bahwa data siap untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik inferensial dan panel data.

3.5.2. Analisis Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu kombinasi data cross-section (perusahaan) dan time series (periode 2020–2024). Penggunaan regresi data panel bertujuan untuk menangkap variasi karakteristik antar perusahaan serta perubahan perilaku perusahaan antarwaktu secara simultan, sehingga menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dan robust. Regresi data panel dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi, dengan tetap mengendalikan pengaruh variabel karakteristik perusahaan. Model regresi data panel dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PAC_{it} = \alpha + \beta_1 KOP_{it} + \beta_2 UKA_{it} + \beta_3 KKA_{it} + \beta_4 FRK_{it} + \beta_5 SIZE_{it} + \beta_6 ROA_{it} + \beta_7 LEV_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PAC_{it} = Indeks pengungkapan antikorupsi perusahaan i pada tahun t

KOP_{it} = Koneksi politik (proporsi dewan komisaris berlatar belakang politik)

UKA_{it} = Ukuran komite audit

KKA_{it} = Keahlian komite audit

FRK_{it} = Frekuensi rapat komite audit

FSZ_{it} = Ukuran perusahaan (ln total aset)

ROA_{it} = Profitabilitas (Return on Assets)

LEV_{it} = Leverage (Debt to Assets Ratio)

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi

ε_{it} = Error term

Model regresi ini digunakan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit terhadap tingkat pengungkapan antikorupsi perusahaan. Dengan menggunakan model ini, penelitian dapat menguji Hipotesis 1 (H1) sampai dengan Hipotesis 4 (H4) secara simultan.

3.5.2.1. Model Regresi Data Panel

3.5.2.1.1. Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model, yang juga dikenal sebagai *Pooled Ordinary Least Squares (Pooled OLS)*, merupakan model regresi data panel yang mengasumsikan bahwa seluruh unit observasi memiliki karakteristik yang sama, baik antar perusahaan maupun antar periode waktu. Model ini tidak memperhitungkan adanya perbedaan karakteristik individu maupun variasi waktu secara spesifik. Oleh karena itu, seluruh data panel diperlakukan sebagai satu kumpulan data tunggal dan diestimasi menggunakan metode regresi OLS konvensional. Pendekatan ini digunakan sebagai model dasar (*baseline model*) dalam analisis data panel. Namun, apabila terdapat heterogenitas yang signifikan antar perusahaan atau antar waktu, penggunaan CEM berpotensi menghasilkan estimasi yang bias.

3.5.2.1.2. Fixed Effect Model (FEM)

Fixed Effect Model merupakan model regresi data panel yang mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik khusus pada setiap unit individu yang bersifat konstan sepanjang periode pengamatan. Model ini mengasumsikan bahwa karakteristik individu tersebut dapat berkorelasi dengan variabel independen dalam model. Dengan memasukkan efek individu secara eksplisit, *Fixed Effect Model* bertujuan untuk mengendalikan pengaruh variabel yang tidak teramati (*unobserved heterogeneity*) namun berpotensi memengaruhi variabel dependen. Oleh karena itu, FEM dinilai mampu menghasilkan estimasi yang lebih akurat apabila perbedaan antar perusahaan bersifat sistematis dan tidak dapat diabaikan.

3.5.2.1.3. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model berasumsi bahwa perbedaan karakteristik antar individu dalam data panel bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen yang digunakan dalam model. Pada model ini, efek individu tidak dimasukkan sebagai variabel dummy, melainkan menjadi bagian dari komponen *error term*. Pendekatan *Random Effect* memungkinkan penggunaan variasi data yang lebih luas, baik antar individu maupun antar waktu, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih efisien dibandingkan *Fixed Effect Model*, selama asumsi ketidakterkaitan antara efek individu dan variabel independen terpenuhi.

3.5.2.2. Uji Estimasi Model

3.5.2.2.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan antar individu maupun antar periode waktu. Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka *Fixed Effect Model* dinilai lebih sesuai dibandingkan *Common Effect Model*.

3.5.2.2.2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan Fixed Effect Model (FEM) dengan Random Effect Model (REM). Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah efek individual dalam data panel berkorelasi dengan variabel independen atau tidak. Jika efek individual berkorelasi dengan variabel independen, maka model FEM lebih tepat digunakan karena menghasilkan estimasi yang konsisten. Sebaliknya, jika tidak terdapat korelasi, maka model REM lebih efisien dan dapat digunakan. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas (p-value). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka model FEM dipilih. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model REM dinilai lebih sesuai untuk digunakan dalam analisis data panel.

3.5.2.2.3. Uji Multiple Langrange

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk membandingkan Common Effect Model (CEM) dengan Random Effect Model (REM). Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model dengan efek acak (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan model pooled (CEM) dengan mempertimbangkan adanya variasi antar individu (perusahaan). Jika hasil uji menunjukkan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka model REM

lebih sesuai digunakan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model CEM dinilai lebih tepat digunakan.

Tabel 3. 2. Kriteria Pemilihan Model

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	$H_0 = \text{Prob.} > 0,05$	CEM
	$H_1 = \text{Prob.} < 0,05$	FEM
Uji Hausman	$H_0 = \text{Prob.} > 0,05$	REM
	$H_1 = \text{Prob.} < 0,05$	FEM
Uji Lagrange Multiplier	$H_0 = \text{Prob.} > 0,05$	CEM
	$H_1 = \text{Prob.} < 0,05$	REM

Apabila hasil uji Chow menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) lebih tepat dibandingkan *Common Effect Model* (CEM), maka pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara FEM dan *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, apabila diperlukan, uji *Lagrange Multiplier* (LM) digunakan untuk membandingkan CEM dengan REM. Dalam kondisi tertentu, apabila uji Hausman mengalami kendala teknis, pemilihan model dapat didasarkan pada pertimbangan karakteristik data dan kesesuaian model dengan tujuan penelitian.

3.5.2.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik difokuskan pada uji multikolinearitas untuk memastikan tidak adanya korelasi tinggi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$. Selain itu, untuk mengatasi potensi pelanggaran asumsi klasik, khususnya

heteroskedastisitas, estimasi model regresi dilakukan dengan menggunakan *robust standard error*, sehingga hasil estimasi menjadi lebih reliabel.

3.5.2.4. Uji Hipotesis

3.5.2.4.1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau melihat nilai probabilitas (p-value). Apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel atau p-value lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika t-hitung lebih kecil atau sama dengan t-tabel atau p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H_0 diterima.

3.5.2.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel atau berdasarkan nilai p-value. Apabila F-hitung lebih besar dari F-tabel atau p-value kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak, yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila F-hitung lebih kecil atau sama dengan F-tabel atau p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H_0 diterima.

3.5.2.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan penjelasan model yang semakin baik, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan yang rendah. Untuk mengatasi kelemahan R^2 yang cenderung meningkat seiring dengan penambahan jumlah variabel independen, digunakan *Adjusted R^2* . Ukuran ini memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap kualitas model karena mempertimbangkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam analisis. Dalam model data panel, interpretasi koefisien determinasi yang digunakan adalah *R-squared* (overall), yang menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam masing-masing individu.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Sampel penelitian difokuskan pada dua sektor utama, yaitu sektor keuangan dan sektor manufaktur, yang dipilih berdasarkan karakteristiknya yang memiliki tingkat kompleksitas operasional dan tuntutan transparansi yang tinggi. Pada sektor keuangan, jumlah populasi perusahaan yang terdaftar sebanyak 46 emiten. Namun, setelah dilakukan proses seleksi data berdasarkan kriteria kelengkapan dan ketersediaan informasi, hanya 42 perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian. Sebanyak 4 perusahaan tidak dapat diikutsertakan karena laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan tidak dapat diakses, baik melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia maupun situs resmi perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, pada sektor manufaktur, jumlah populasi perusahaan yang terdaftar sebanyak 165 emiten. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147 perusahaan memenuhi kriteria dan dapat diolah sebagai sampel penelitian. Sebanyak 18 perusahaan lainnya tidak dapat digunakan karena laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang tidak dapat diakses, serta tidak menyediakan informasi yang diperlukan terkait variabel penelitian secara konsisten selama periode pengamatan.

Tabel 4. 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Sampel	Sektor Keuangan	Sektor Manufaktur
1	Perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2020-2024	46	165

2	Perusahaan yang Laporan Tahunan dan/ Laporan Keberlanjutan tidak dapat diakses	(4)	(18)
3	Perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian	42	147
Total Sampel Penelitian		189	

Dengan demikian, total sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan dari perusahaan sektor keuangan dan manufaktur yaitu 189 sampel yang memenuhi kriteria kelengkapan data. Penggunaan data panel dalam penelitian ini menghasilkan dataset yang bersifat *unbalanced*, karena tidak semua perusahaan memiliki data yang lengkap untuk seluruh periode pengamatan.

4.2. Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 4. 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Observation	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maximum
PAC	933	0.564373	0.2509522	0	1
KOP	933	0.091522	0.1778569	0	1
UKA	933	3.227224	0.7736462	1	9
KKA	933	0.7594319	0.2374335	0.25	1
FRK	933	8.261522	7.628034	1	80
FSZ	933	15.37001	2.103371	9.15	21.61
ROA	933	0.0236484	0.111066	-0.95	0.944
LEV	933	0.5859646	0.5900238	0.002	10.20

Sumber: hasil output Stata 17, 2026

Keterangan: KAP: Pengungkapan Antikorupsi; KOP: Koneksi Politik; UKA: Ukuran Komite Audit; KKA: Keahlian Komite Audit; FRK: Frekuensi Rapat Komite Audit; FSZ: *Firm Size*; ROA: *Profitabilitas*; LEV: *Leverage*.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian yang mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), nilai minimum, dan nilai maksimum dari masing-masing variabel.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.1, jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 933 data.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan antikorupsi (PAC) yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5637. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pengungkapan antikorupsi perusahaan berada pada kategori sedang, atau belum sepenuhnya optimal. Nilai minimum sebesar 0 yaitu dari perusahaan Tempo Scan Pasucuf Tbk (TSPC) dan Sekar Bumi Tbk (SKBM) menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan antikorupsi sama sekali, sedangkan nilai maksimum sebesar 1 salah satunya perusahaan perbankan yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang telah melakukan pengungkapan secara penuh. Standar deviasi sebesar 0,2498 mengindikasikan adanya variasi yang cukup moderat antar perusahaan dalam melakukan pengungkapan antikorupsi.

Variabel koneksi politik (KOP) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0915, yang menunjukkan bahwa secara umum proporsi koneksi politik dalam perusahaan relatif rendah. Nilai minimum sebesar 0 pada salah satunya perusahaan PT Bank Sentral Asia (BBCA) dari sektor keuangan perbankan sedangkan dari sektor manufaktur yaitu Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik, sedangkan nilai maksimum sebesar 1 salah satunya pada PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) menunjukkan adanya perusahaan dengan koneksi politik yang sangat kuat. Standar deviasi sebesar 0,1779 mengindikasikan bahwa variasi koneksi politik antar perusahaan cenderung rendah hingga moderat.

Variabel ukuran komite audit (UKA) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,2272, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki jumlah anggota komite audit sekitar tiga orang, sesuai dengan ketentuan minimum yang diatur dalam regulasi. Nilai minimum sebesar 1 yaitu Panasia Indo Resources Tbk (HDTX) dan maksimum sebesar 9 yaitu oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menunjukkan adanya variasi ukuran komite audit antar perusahaan, meskipun tidak terlalu ekstrem. Standar deviasi sebesar 0,7736 mengindikasikan bahwa variasi ukuran komite audit relatif rendah.

Variabel keahlian komite audit (KKA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7594, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggota komite audit telah memiliki latar belakang keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Nilai minimum sebesar 0,25 yaitu salah satunya oleh perusahaan Mandom Indonesia Tbk (TCID) menunjukkan bahwa terdapat perusahaan dengan tingkat keahlian yang relatif rendah, sedangkan nilai maksimum sebesar 1 menunjukkan bahwa seluruh anggota komite audit memiliki keahlian yang relevan. Standar deviasi sebesar 0,2374 menunjukkan adanya variasi moderat dalam tingkat keahlian komite audit antar perusahaan.

Variabel frekuensi rapat komite audit (FRK) memiliki nilai rata-rata sebesar 8,2615, yang menunjukkan bahwa secara umum komite audit melakukan rapat sekitar 8 kali dalam satu tahun. Nilai minimum sebesar 1 menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan rapat komite audit dalam periode tertentu, sedangkan nilai maksimum sebesar 80 yaitu Krakatau Steel Persero Tbk (KRAS) menunjukkan adanya perusahaan dengan intensitas rapat yang sangat tinggi. Standar deviasi sebesar 7,6280 mengindikasikan variasi yang sangat tinggi dalam frekuensi

rapat antar perusahaan, yang menunjukkan perbedaan tingkat aktivitas pengawasan yang cukup signifikan.

Variabel ukuran perusahaan (*FSZ*) memiliki nilai rata-rata sebesar 15,3700, yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam sampel memiliki skala yang relatif besar. Nilai minimum sebesar 9,15 dan maksimum sebesar 21,61 menunjukkan adanya variasi ukuran perusahaan yang cukup lebar. Standar deviasi sebesar 2,1033 mengindikasikan adanya perbedaan ukuran yang cukup signifikan antar perusahaan dalam sampel penelitian. Variabel *profitabilitas (ROA)* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0236, yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang relatif rendah. Nilai minimum sebesar -0,95 menunjukkan adanya perusahaan yang mengalami kerugian, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,944 menunjukkan adanya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi. Standar deviasi sebesar 0,1111 menunjukkan variasi yang relatif moderat dalam tingkat profitabilitas antar perusahaan. Variabel *leverage (LEV)* memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5860, yang menunjukkan bahwa secara umum perusahaan memiliki tingkat penggunaan utang yang cukup tinggi dalam struktur permodalannya. Nilai minimum sebesar 0,002 menunjukkan adanya perusahaan dengan tingkat utang yang sangat rendah, sedangkan nilai maksimum sebesar 10,20 menunjukkan adanya perusahaan dengan tingkat leverage yang sangat tinggi. Standar deviasi sebesar 0,5900 menunjukkan variasi yang cukup besar dalam struktur pendanaan antar perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan antar perusahaan dalam hal karakteristik tata kelola dan keuangan, yang mendukung penggunaan analisis regresi data panel untuk menangkap perbedaan tersebut secara lebih komprehensif.

4.3. Uji Estimasi Model

4.3.1. Uji Chow

Hasil uji Chow menunjukkan nilai F sebesar 8,56 dengan nilai probabilitas ($\text{Prob} > F$) sebesar 0,0000. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa model Fixed Effect Model (FEM) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM). Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antar perusahaan yang signifikan, sehingga model yang mengakomodasi efek individual, yaitu FEM, lebih sesuai dibandingkan model pooled (CEM) yang mengasumsikan tidak adanya perbedaan antar individu.

4.3.2. Uji Hausman

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas ($\text{Prob} > \chi^2$) sebesar 0,0589. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil ini menunjukkan bahwa efek individual dalam data tidak berkorelasi secara signifikan dengan variabel independen, sehingga model REM yang lebih efisien dapat digunakan dalam penelitian ini.

4.3.3. Uji Multiple Langrange

Hasil uji Lagrange Multiplier menunjukkan nilai probabilitas ($\text{Prob} > \chi^2$) sebesar 0,0000. Nilai ini lebih kecil dari 0,05, sehingga model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat efek individual yang signifikan dalam data panel, sehingga penggunaan model REM lebih sesuai dibandingkan model CEM.

4.4. Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
KOP	1.17	0.852682
UKA	1.35	0.740353
KKA	1.02	0.979738
FRK	1.44	0.693207
FSZ	1.49	0.673311
ROA	1.23	0.812389
LEV	1.21	0.829050
Mean VIF	1.27	

Sumber: Hasil Output Stata 17, 2026

Keterangan: KAP: Pengungkapan Antikorupsi; KOP: Koneksi Politik; UKA: Ukuran Komite Audit; KKA: Keahlian Komite Audit; FRK: Frekuensi Rapat Komite Audit; FSZ: *Firm Size*; ROA: *Profitabilitas*; LEV: *Leverage*.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai VIF di bawah 10. Nilai VIF tertinggi terdapat pada variabel *firm size* sebesar 1,49, sedangkan nilai VIF terendah terdapat pada variabel keahlian komite audit sebesar 1,02. Selain itu, nilai rata-rata VIF sebesar 1,27 menunjukkan bahwa secara keseluruhan model tidak mengalami masalah multikolinearitas. Menurut Gujarati dan Porter (2009), nilai VIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang serius dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi secara tinggi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.5. Uji Hipotesis

4.5.1. Uji t

Tabel 4. 4. Hasil Uji t

PAC	Koefisien	Robust Std. Err.	z	P> z	Keterangan
KOP	-0.0180598	0.0710433	-0.25	0.799	Negatif Tidak Signifikan
UKA	0.0154302	0.0085972	1.79	0.073	Positif Signifikan**
KKA	0.0242906	0.0619106	0.39	0.695	Positif Tidak Signifikan
FRK	0.0059094	0.0015772	3.75	0.000	Positif Signifikan*

Sumber: Hasil Output Stata 17, 2026

Keterangan: (*) : Positif Signifikan pada tingkat signifikansi 0,05;

(**) : Positif Signifikan pada tingkat signifikansi 0,10.

Berdasarkan Tabel 4.3. dapat dijelaskan hasil uji t, sebagai berikut:

- Variabel koneksi politik (KOP) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,799 ($> 0,05$), sehingga H_0 tidak dapat ditolak dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Maka hipotesis variabel Koneksi Politik terhadap Pengungkapan Antikorupsi tidak didukung.
- Variabel ukuran komite audit (UKA) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,073, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0,05), namun lebih kecil dari tingkat signifikansi 10% (0,10). Dengan demikian, pada tingkat signifikansi 5% H_0 tidak dapat ditolak, tetapi pada tingkat signifikansi 10% variabel ukuran komite audit dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Maka, hipotesis variabel Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi didukung pada tingkat signifikansi 10% atau signifikan secara marginal.

- c. Variabel keahlian komite audit (KKA) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,695 ($> 0,05$), sehingga H_0 tidak dapat ditolak dan H_1 ditolak, yang berarti keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Maka, hipotesis variabel Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi tidak didukung.
- d. Variabel frekuensi rapat komite audit (FRK) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,000 ($< 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Maka, hipotesis variabel Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi didukung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel frekuensi rapat komite audit terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Selain itu, variabel ukuran komite audit juga menunjukkan pengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 10% (signifikan marginal), sedangkan variabel lainnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi.

4.5.2. Uji F

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Wald χ^2 sebesar 73,05 dengan nilai probabilitas ($\text{Prob} > \chi^2$) sebesar 0,0000. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel koneksi politik, ukuran komite audit, keahlian komite audit, frekuensi rapat komite audit, serta variabel kontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi. Dengan demikian, model penelitian yang

digunakan telah layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

4.5.3. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared:
Within = 0.0096
Between = 0.1863
Overall = 0.1383

Sumber: Hasil Output Stata 17, 2026

Berdasarkan dari hasil pengujian, nilai *R-Squared Overall* menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model mampu menjelaskan sebesar 13,83% variasi pengungkapan antikorupsi, sedangkan sisanya sebesar 86.17% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi ($p\text{-value} = 0,799 > 0,05$), sehingga H_0 tidak dapat ditolak (diterima) dan H_1 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan koneksi politik dalam perusahaan tidak secara langsung menentukan tingkat transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi antikorupsi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik maupun yang tidak memiliki koneksi politik cenderung menunjukkan pola pengungkapan yang relatif serupa. Dari sisi perspektif Teori Agensi, koneksi politik berpotensi meningkatkan konflik kepentingan karena manajemen memiliki akses terhadap kekuatan eksternal

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (Jensen & Meckling, 1976). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung memiliki kualitas pelaporan yang lebih rendah dan lebih rentan terhadap praktik oportunistik (Chaney et al., 2011). Namun demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung argumentasi tersebut. Ketidaksignifikanan koneksi politik menunjukkan bahwa pengaruh hubungan politik terhadap praktik pengungkapan tidak selalu bersifat langsung dan universal. Kondisi ini dapat dijelaskan juga melalui perspektif *legitimacy theory*. Suchman (1995) menjelaskan bahwa perusahaan akan berupaya mempertahankan legitimasi dengan memenuhi ekspektasi publik, termasuk melalui pengungkapan informasi terkait tata kelola dan antikorupsi. Pada perusahaan publik di Indonesia, tekanan untuk menjaga legitimasi tidak hanya berasal dari regulator, tetapi juga dari investor, media, dan masyarakat. Akibatnya, perusahaan tetap terdorong untuk melakukan pengungkapan antikorupsi terlepas dari ada atau tidaknya koneksi politik.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan dari kondisi empiris data penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan antikorupsi perusahaan mencapai 0,564 dengan standar deviasi sebesar 0,251. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel telah memiliki tingkat pengungkapan yang relatif moderat dan cenderung homogen. Kondisi ini menyebabkan koneksi politik menjadi kurang mampu menjelaskan variasi pengungkapan antar perusahaan. Hasil analisis sektoral juga memperkuat temuan tersebut. Pada sektor keuangan, koneksi politik memiliki nilai probabilitas sebesar 0,893, sedangkan pada sektor manufaktur sebesar 0,609. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik tetap tidak signifikan pada masing-masing sektor. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan antikorupsi tidak konsisten

bahkan setelah perusahaan dipisahkan berdasarkan karakteristik industrinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengungkapan antikorupsi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan legitimasi dan kepatuhan regulasi dibandingkan hubungan politik perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap pengungkapan antikorupsi tidak konsisten bahkan setelah perusahaan dipisahkan berdasarkan karakteristik industrinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengungkapan antikorupsi di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan legitimasi dan kepatuhan regulasi dibandingkan hubungan politik perusahaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan regulasi dan perhatian terhadap praktik pengungkapan antikorupsi di Indonesia yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Studi literatur terbaru juga menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengungkapan antikorupsi di Indonesia semakin berkembang dan didominasi oleh pembahasan mengenai tata kelola perusahaan, transparansi, serta faktor-faktor pengawasan internal perusahaan (Khairatun & Setiawan, 2025).

Selain itu, perspektif budaya dari Hofstede juga dapat membantu menjelaskan hasil penelitian ini. Indonesia termasuk negara dengan karakteristik *high power distance* dan *collectivism*, di mana hubungan hierarkis dan kedekatan dengan kekuasaan dianggap sebagai sesuatu yang relatif normal dalam lingkungan sosial dan organisasi. Akibatnya, keberadaan koneksi politik tidak selalu dipersepsikan sebagai kondisi yang harus direspons melalui peningkatan maupun penurunan pengungkapan. Di sisi lain, budaya kolektivisme mendorong perusahaan untuk menjaga harmoni dan citra organisasi melalui pola pelaporan yang relatif seragam. Kondisi ini menyebabkan koneksi politik tidak menjadi faktor utama yang membedakan tingkat pengungkapan antikorupsi antar perusahaan.

Dengan demikian, ketidaksignifikanan koneksi politik dalam penelitian ini bukan menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak penting, melainkan menunjukkan bahwa pengaruhnya telah “teredam” oleh faktor lain yang lebih dominan, seperti tekanan legitimasi, standar pelaporan, dan tuntutan transparansi publik. Oleh karena itu, dalam konteks perusahaan publik di Indonesia, koneksi politik belum dapat dianggap sebagai determinan utama dalam praktik pengungkapan antikorupsi.

4.6.2. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,073, yang berarti tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5% (0,05), namun signifikan pada tingkat signifikansi 10% (0,10). Dengan demikian, ukuran komite audit dapat dikatakan berpengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi pada tingkat signifikansi 10% atau signifikan secara marginal. Oleh karena itu, H2 didukung secara marginal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka terdapat kecenderungan meningkatnya pengungkapan antikorupsi perusahaan, meskipun pengaruhnya belum cukup kuat pada tingkat signifikansi utama. Menurut Teori Agensi, komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Ukuran komite audit yang lebih besar secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kapasitas monitoring karena perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya, waktu, serta keberagaman perspektif dalam melakukan pengawasan. Semakin banyak anggota komite audit, semakin besar pula peluang perusahaan untuk melakukan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap praktik pelaporan dan kepatuhan perusahaan, termasuk dalam pengungkapan antikorupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit memang memiliki kecenderungan untuk meningkatkan transparansi perusahaan, namun pengaruh tersebut relatif lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah anggota komite audit tetap memiliki kontribusi terhadap kualitas pengungkapan, tetapi bukan menjadi faktor dominan yang secara langsung menentukan tinggi rendahnya pengungkapan antikorupsi perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan jumlah anggota komite audit dapat memperluas kapasitas pengawasan, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada bagaimana fungsi pengawasan tersebut dijalankan dalam praktik.

Temuan ini juga didukung oleh kondisi empiris dalam data penelitian. Sebagai contoh, Bank Central Asia (BBCA) memiliki ukuran komite audit sebanyak 3 anggota dan mampu menunjukkan tingkat pengungkapan antikorupsi yang sangat tinggi dengan nilai pengungkapan sebesar 1. Di sisi lain, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) memiliki jumlah anggota komite audit yang lebih besar, yaitu 8 anggota, dengan tingkat pengungkapan antikorupsi sebesar 0,67. Meskipun perusahaan dengan jumlah anggota yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas pengawasan yang lebih luas, hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah anggota tidak selalu menghasilkan peningkatan pengungkapan yang proporsional. Namun demikian, secara umum arah koefisien yang positif tetap menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan ukuran komite audit yang lebih kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian Masud et al. (2019) yang menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan komite audit berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengungkapan dan transparansi perusahaan. Penelitian terbaru Tessema (2025) juga menjelaskan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan tetap memiliki kontribusi dalam meningkatkan

kualitas pelaporan, meskipun efektivitasnya dipengaruhi oleh implementasi pengawasan dalam praktik.

Selain itu, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata ukuran komite audit perusahaan dalam penelitian ini sebesar 3,227 anggota dengan standar deviasi sebesar 0,774. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki ukuran komite audit yang relatif seragam dan cenderung mengikuti ketentuan minimal regulator. Kondisi ini menyebabkan variasi ukuran komite audit antar perusahaan menjadi terbatas, sehingga pengaruhnya terhadap variasi pengungkapan antikorupsi tidak terlalu kuat secara statistik. Dengan kata lain, ukuran komite audit tetap memiliki pengaruh terhadap pengungkapan antikorupsi, tetapi pengaruh tersebut cenderung terbatas karena sebagian besar perusahaan telah memenuhi struktur minimum yang relatif sama.

Tabel 4. 6. Hasil Robustness Check x2

PAC	Koefisien	Robust Std. Err.	z	P> z
UKA	0.0189763	0.0089811	2.11	0.035
FSZ	0.0327435	0.0069065	4.74	0.000
ROA	0.0084619	0.0634095	0.13	0.894
LEV	-0.0130435	0.0128766	-1.01	0.311

Sumber: Hasil Output Stata 17, 2026

Hasil *robustness check* pada tabel 4.5. diatas juga memperkuat temuan tersebut. Pada model alternatif, ukuran komite audit menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,035. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengaruh ukuran komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi tetap konsisten secara arah dan bahkan menjadi lebih kuat pada pengujian tambahan. Dengan demikian, hasil robustness check mendukung kesimpulan bahwa ukuran komite audit memiliki

pengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi, meskipun tingkat signifikansinya dalam model utama masih berada pada level marginal (10%). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit tetap memiliki peran dalam meningkatkan pengungkapan antikorupsi perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit, semakin besar pula kapasitas pengawasan yang dimiliki perusahaan. Namun, efektivitas pengaruh tersebut tetap dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, keterlibatan anggota, serta implementasi fungsi pengawasan dalam praktik tata kelola perusahaan.

4.6.3. Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi ($p\text{-value} = 0,695 > 0,05$), sehingga H_0 tidak dapat ditolak (diterima) dan H_3 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan belum tentu diikuti dengan peningkatan transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi antikorupsi. Dengan demikian, kompetensi formal yang dimiliki anggota komite audit tidak secara langsung menjadi faktor penentu dalam luasnya pengungkapan antikorupsi perusahaan. Komite audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Anggota komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan karena memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas laporan perusahaan, mengevaluasi risiko, serta mendeteksi potensi penyimpangan secara lebih akurat. Penelitian Krishnan (2005) juga menunjukkan bahwa keahlian komite audit berkaitan dengan kualitas pengendalian internal dan kualitas pelaporan perusahaan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan teknis tersebut belum tentu secara langsung mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan antikorupsi yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena pengungkapan antikorupsi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan pelaporan keuangan. Pengungkapan antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan komitmen perusahaan terhadap etika, integritas organisasi, tata kelola, serta keberanian perusahaan dalam menyampaikan informasi yang sensitif kepada publik. Dengan demikian, keberadaan anggota yang ahli dalam bidang keuangan belum tentu cukup untuk mendorong peningkatan transparansi apabila budaya organisasi dan komitmen tata kelola perusahaan belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut terlihat dalam data penelitian. Beberapa perusahaan dengan proporsi anggota komite audit berlatar belakang keuangan yang tinggi tetap menunjukkan tingkat pengungkapan antikorupsi yang relatif moderat. Sebagai contoh, Bank Mandiri (BMRI) memiliki proporsi keahlian komite audit sebesar 1, yang berarti seluruh anggota komite audit memiliki latar belakang keuangan atau akuntansi, namun tingkat pengungkapan antikorupsinya berada pada angka 0,67. Di sisi lain, terdapat perusahaan dengan proporsi keahlian yang lebih rendah tetapi mampu menunjukkan tingkat pengungkapan yang relatif serupa. Pola tersebut menunjukkan bahwa kompetensi formal anggota komite audit belum tentu menjadi faktor pembeda utama dalam praktik pengungkapan antikorupsi perusahaan. Selain itu, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata proporsi keahlian komite audit dalam penelitian ini tergolong tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan pada dasarnya telah memenuhi ketentuan formal terkait keberadaan anggota komite audit yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Akibatnya, variasi keahlian antar perusahaan menjadi relatif kecil sehingga

pengaruhnya terhadap variasi pengungkapan antikorupsi menjadi kurang terlihat secara statistik. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa keberadaan ahli keuangan dalam komite audit pada banyak perusahaan lebih bersifat pemenuhan regulasi dibandingkan diferensiasi kualitas tata kelola perusahaan.

Temuan penelitian ini menjadi relevan dengan perkembangan praktik tata kelola perusahaan saat ini, di mana isu keberlanjutan dan transparansi semakin berkembang melampaui aspek keuangan tradisional. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik dan regulator tidak hanya berfokus pada kualitas laporan keuangan, tetapi juga pada komitmen perusahaan terhadap isu ESG (*Environmental, Social, and Governance*), etika bisnis, dan praktik antikorupsi. Konsekuensinya, kemampuan teknis akuntansi saja tidak lagi cukup untuk menjelaskan kualitas transparansi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan juga dituntut memiliki budaya tata kelola yang kuat, komitmen etika organisasi, serta mekanisme pengawasan yang benar-benar aktif dalam praktik. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur formal atau kompetensi teknis, tetapi juga oleh bagaimana fungsi pengawasan dijalankan secara nyata dalam organisasi (Salihu, 2025). Hal ini menjelaskan mengapa keberadaan anggota komite audit yang memiliki keahlian tinggi belum tentu menghasilkan tingkat pengungkapan antikorupsi yang lebih baik apabila tidak diikuti dengan implementasi pengawasan yang efektif dan komitmen perusahaan terhadap transparansi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit belum menjadi determinan utama dalam meningkatkan pengungkapan antikorupsi perusahaan. Transparansi perusahaan tampaknya lebih dipengaruhi oleh kualitas

implementasi tata kelola, budaya organisasi, dan komitmen perusahaan terhadap integritas dibandingkan sekadar kompetensi teknis yang dimiliki anggota komite audit.

4.6.4. Pengaruh Frekuensi Rapat terhadap Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi ($p\text{-value} = 0,000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_4 diterima. Koefisien positif menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas rapat komite audit, semakin tinggi pula tingkat pengungkapan antikorupsi perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan secara aktif dan berkelanjutan memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Dari sisi agensi teori, konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan dapat diminimalkan melalui mekanisme pengawasan yang efektif (Jensen & Meckling, 1976). Frekuensi rapat komite audit mencerminkan intensitas keterlibatan komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Semakin tinggi intensitas rapat komite audit, maka semakin besar peluang bagi komite audit untuk melakukan evaluasi terhadap laporan perusahaan, membahas temuan audit, mengidentifikasi potensi risiko, serta menyinggung aspek kepatuhan dan transparansi perusahaan, termasuk terkait pengungkapan antikorupsi. Dengan demikian, rapat komite audit tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana utama dalam proses monitoring dan pengendalian perusahaan. Berbeda dengan karakteristik struktural seperti ukuran dan keahlian komite audit, frekuensi rapat mencerminkan aktivitas pengawasan yang bersifat nyata (*actual monitoring activity*). Hal ini menjelaskan mengapa frekuensi rapat dalam penelitian ini justru menjadi variabel yang paling konsisten memengaruhi pengungkapan antikorupsi. Penelitian Xie et al. (2003) juga menunjukkan bahwa aktivitas komite audit, termasuk intensitas rapat, berkaitan dengan peningkatan kualitas pelaporan perusahaan. Semakin

aktif komite audit menjalankan fungsi pengawasan, semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan tidak hanya bergantung pada keberadaan organ pengawasan secara formal, tetapi lebih ditentukan oleh seberapa aktif organ tersebut menjalankan fungsinya dalam praktik. Dalam banyak kasus, perusahaan telah memenuhi ketentuan tata kelola seperti pembentukan komite audit dan keberadaan anggota independen, namun efektivitas pengawasannya belum tentu berjalan optimal. Oleh karena itu, frekuensi rapat menjadi indikator yang lebih substantif dalam menilai kualitas implementasi tata kelola dibandingkan sekadar struktur organisasi yang bersifat administratif. Temuan ini menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan tata kelola perusahaan saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian regulator, investor, dan publik terhadap isu ESG (*Environmental, Social, and Governance*) terus meningkat. Transparansi perusahaan kini tidak lagi hanya dinilai dari kualitas laporan keuangan, tetapi juga dari komitmen perusahaan terhadap etika bisnis, keberlanjutan, dan praktik antikorupsi. Dalam kondisi tersebut, komite audit dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tradisional, tetapi juga meningkatkan perhatian terhadap sistem pengendalian dan transparansi perusahaan terhadap risiko non-keuangan, termasuk risiko korupsi dan pelanggaran etika.

Selain itu, tingginya frekuensi rapat juga menunjukkan adanya budaya pengawasan yang lebih aktif dalam perusahaan. Rapat yang dilakukan secara rutin memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih intens antara anggota komite audit, auditor internal, manajemen, maupun dewan komisaris. Proses tersebut menciptakan peluang diskusi yang lebih luas terkait efektivitas pengendalian internal, transparansi

perusahaan, serta potensi masalah tata kelola yang memerlukan tindak lanjut. Dengan demikian, rapat komite audit tidak hanya berfungsi sebagai agenda formal perusahaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan dan penguatan akuntabilitas organisasi.

Legitimacy theory (Suchman, 1995) juga dapat menjelaskan hasil penelitian ini. Intensitas rapat yang tinggi menciptakan tekanan internal bagi manajemen untuk mempertahankan legitimasi perusahaan melalui praktik pelaporan yang lebih transparan. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terdokumentasi meningkatkan peluang perusahaan untuk lebih memperhatikan kualitas transparansi dan pengungkapan perusahaan, termasuk terkait aspek antikorupsi. Dalam konteks ini, rapat komite audit berfungsi sebagai mekanisme internal yang membantu perusahaan menjaga kepercayaan publik dan reputasi organisasi, terutama di tengah meningkatnya tuntutan terhadap praktik bisnis yang etis dan akuntabel. Kondisi tersebut juga terlihat secara empiris dalam data penelitian. Perusahaan seperti Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) yang memiliki frekuensi rapat komite audit relatif tinggi, masing-masing sebanyak 80 kali rapat pada tahun 2022 dan 43 kali rapat pada tahun 2023, menunjukkan tingkat pengungkapan antikorupsi yang sangat baik dengan nilai pengungkapan sebesar 1. Sebaliknya, Indospring Tbk (INDS) yang memiliki frekuensi rapat yang rendah, yaitu hanya 2 kali rapat selama tiga tahun berturut-turut, menunjukkan tingkat pengungkapan antikorupsi yang lebih rendah dengan nilai pengungkapan sebesar 0,33 atau hanya mengungkapkan 1 dari 3 indikator GRI 205. Pola tersebut menunjukkan adanya kecenderungan bahwa intensitas aktivitas pengawasan berkaitan dengan tingkat transparansi perusahaan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan lebih dipengaruhi oleh kualitas implementasi pengawasan dibandingkan sekadar keberadaan struktur formal tata kelola (Tessema, 2025). Dengan kata lain, perusahaan yang secara aktif menjalankan mekanisme pengawasan cenderung memiliki kualitas pelaporan dan transparansi yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang hanya memenuhi ketentuan tata kelola secara administratif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa frekuensi rapat komite audit merupakan faktor yang paling konsisten dalam memengaruhi pengungkapan antikorupsi dibandingkan variabel lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan lebih ditentukan oleh aktivitas pengawasan yang bersifat langsung, aktif, dan operasional dibandingkan karakteristik struktural yang hanya bersifat formal.

4.6.5. Analisis Tambahan per Sektor

A. Analisis Sektor Keuangan

Hasil pengujian pada sektor keuangan menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan tidak signifikan dengan nilai Prob > χ^2 sebesar 0,2502. Selain itu, nilai koefisien determinasi (*overall R²*) sebesar 0,1864 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi pengungkapan antikorupsi masih relatif terbatas. Secara parsial, seluruh variabel utama tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, di mana koneksi politik (x1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,893, ukuran komite audit (x2) sebesar 0,737, keahlian komite audit (x3) sebesar 0,316, dan frekuensi rapat komite audit (x4) sebesar 0,307. Hanya variabel ukuran perusahaan (fs) yang menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,025.

Jika dilihat dari statistik deskriptif, rata-rata tingkat pengungkapan antikorupsi pada sektor keuangan mencapai 0,7063 dengan standar deviasi sebesar 0,1035, yang menunjukkan bahwa variasi antar perusahaan relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sektor keuangan memiliki tingkat pengungkapan yang relatif seragam. Dengan kata lain, transparansi dalam sektor ini lebih mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan hasil dari variasi karakteristik internal perusahaan. Oleh karena itu, variabel seperti koneksi politik maupun karakteristik komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan karena ruang variasi perilaku perusahaan yang terbatas.

B. Analisis Sektor Manufaktur

Berbeda dengan sektor keuangan, hasil pengujian pada sektor manufaktur menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dengan nilai Prob > χ^2 sebesar 0,0000. Namun demikian, nilai koefisien determinasi (*overall R²*) sebesar 0,0739 menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi pengungkapan antikorupsi masih relatif rendah. Secara parsial, hanya variabel frekuensi rapat komite audit (x4) yang berpengaruh signifikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,001 dan koefisien sebesar 0,0077. Sementara itu, variabel koneksi politik (x1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,609, ukuran komite audit (x2) sebesar 0,134, dan keahlian komite audit (x3) sebesar 0,782, yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut tidak signifikan.

Dari sisi statistik deskriptif, rata-rata pengungkapan antikorupsi pada sektor manufaktur sebesar 0,5220 dengan standar deviasi sebesar 0,2641, yang menunjukkan variasi yang jauh lebih besar dibandingkan sektor keuangan. Selain

itu, frekuensi rapat komite audit memiliki nilai rata-rata sebesar 6,6657 dengan rentang yang sangat luas, yaitu dari 1 hingga 80 kali rapat dalam satu periode. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam aktivitas pengawasan antar perusahaan. Perusahaan dengan frekuensi rapat yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang lebih baik, sementara perusahaan dengan frekuensi rapat yang rendah menunjukkan tingkat transparansi yang lebih terbatas. Kondisi ini menegaskan bahwa dalam sektor manufaktur, pengungkapan antikorupsi lebih dipengaruhi oleh aktivitas pengawasan yang nyata dibandingkan dengan karakteristik struktural.

C. Perbandingan Antar Sektor

Perbedaan antara sektor keuangan dan manufaktur menunjukkan bahwa pengungkapan antikorupsi sangat bergantung pada konteks industri. Sektor keuangan, dengan rata-rata pengungkapan sebesar 0,7063 dan variasi yang rendah, menunjukkan pola pelaporan yang lebih seragam akibat tekanan regulasi yang tinggi. Sebaliknya, sektor manufaktur dengan rata-rata pengungkapan sebesar 0,5220 dan variasi yang lebih besar menunjukkan bahwa praktik pengungkapan masih dipengaruhi oleh karakteristik internal perusahaan. Selain itu, signifikansi variabel frekuensi rapat komite audit pada sektor manufaktur ($p\text{-value} = 0,001$) dibandingkan dengan ketidaksigifikannya pada sektor keuangan ($p\text{-value} = 0,307$) semakin menegaskan bahwa efektivitas pengawasan internal lebih berperan dalam sektor yang memiliki fleksibilitas lebih tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi perusahaan tidak hanya ditentukan oleh struktur tata kelola, tetapi juga oleh tingkat regulasi dan ruang diskresi yang dimiliki dalam masing-masing sektor industri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan karakteristik komite audit terhadap pengungkapan antikorupsi pada perusahaan sektor keuangan dan manufaktur di Indonesia periode 2020–2024. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM), diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hubungan politik dalam perusahaan tidak menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat transparansi, khususnya dalam konteks perusahaan publik yang berada dalam tekanan regulasi dan standar pelaporan yang relatif kuat.
2. Ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit, maka kapasitas pengawasan perusahaan cenderung meningkat sehingga dapat mendorong transparansi pengungkapan antikorupsi. Namun, pengaruh tersebut masih relatif lemah karena jumlah anggota komite audit belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengawasan perusahaan.
3. Keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi formal anggota komite audit belum tentu diikuti dengan implementasi pengawasan yang efektif dalam praktik pelaporan non-keuangan.

4. Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi. Temuan ini menegaskan bahwa aktivitas pengawasan yang bersifat langsung dan operasional memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi perusahaan.
5. Hasil analisis sektoral menunjukkan bahwa pada sektor keuangan, variabel penelitian tidak berpengaruh signifikan karena tingginya tekanan regulasi yang menyebabkan praktik pengungkapan menjadi seragam. Sebaliknya, pada sektor manufaktur, frekuensi rapat komite audit terbukti signifikan, yang menunjukkan bahwa dalam sektor dengan fleksibilitas lebih tinggi, aktivitas pengawasan internal menjadi faktor yang lebih menentukan.
6. Hasil robustness check menunjukkan bahwa pengaruh ukuran komite audit bersifat tidak stabil, sehingga tidak dapat dianggap sebagai determinan utama dalam menjelaskan pengungkapan antikorupsi.

5.2. Implikasi

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola perusahaan dalam mendorong pengungkapan antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur pengawasan secara formal, tetapi juga oleh aktivitas pengawasan yang dijalankan secara nyata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik komite audit, khususnya ukuran komite audit dan frekuensi rapat, memiliki peran dalam meningkatkan transparansi perusahaan. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan perlu dilihat tidak hanya dari aspek

struktural, tetapi juga dari efektivitas implementasi fungsi pengawasannya. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan antikorupsi bersifat kontekstual dan dapat berbeda pada setiap sektor industri.

2. Implikasi Praktis

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan transparansi perusahaan tidak cukup hanya melalui pemenuhan struktur tata kelola secara administratif, tetapi juga memerlukan aktivitas pengawasan yang aktif dan berkelanjutan. Komite audit perlu menjalankan fungsi monitoring secara lebih efektif melalui intensitas rapat dan keterlibatan aktif dalam proses pengawasan perusahaan. Bagi regulator, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik dalam perusahaan tetap perlu menjadi perhatian dalam praktik tata kelola perusahaan karena berpotensi memengaruhi independensi pengawasan dan transparansi perusahaan. Oleh karena itu, regulator tidak hanya perlu menekankan kepatuhan struktural tata kelola, tetapi juga mendorong efektivitas pengawasan internal serta kualitas implementasi tata kelola perusahaan dalam praktiknya.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih mampu menjelaskan pengungkapan antikorupsi, seperti independensi komite audit, kualitas audit eksternal, kepemilikan institusional, atau faktor budaya perusahaan. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas cakupan sektor industri atau menggunakan periode penelitian yang lebih panjang untuk memperoleh hasil

yang lebih komprehensif. Selain itu, metode penelitian dapat dikembangkan dengan pendekatan kualitatif atau mixed-method untuk menggali lebih dalam praktik pengungkapan antikorupsi yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif.

2. Bagi perusahaan, disarankan untuk tidak hanya memenuhi kewajiban formal tata kelola, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya melalui peningkatan frekuensi dan kualitas rapat komite audit.

DAFTAR PUSTAKA

- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Almarayeh, T. (2025). *Corporate board characteristics , audit fees and political connections : evidence from Jordan*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2024-0131>
- Ameraldo, F. (2025). *Exploring anti-corruption disclosure : Are Islamic banks better than conventional banks?* <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2024-0488>
- Appuhami, R., & Tashakor, S. (2016). *The Impact of Audit Committee Characteristics on CSR Disclosure : An Analysis of Australian Firms*. 1–21. <https://doi.org/10.1111/auar.12170>
- Aprianti, S., Susetyo, D., Meutia, I., & Fuadah, L. L. (2022). Audit Committee Characteristics and Sustainability Reporting in Indonesia. *Proceedings of the 7th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021)*, 647(51), 42–47. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220304.006>
- Arif, H. M., Jalil, A. A., & Mustapha, M. Z. (2024). *Expert and politically connected CEOs and earnings quality : does IFRS adoption matter ?*, 609–629. <https://doi.org/10.1108/ARJ-07-2024-0251>
- Barros, A. do N. F., dos Santos, M. R. L., Melo, I. de A., dos Santos, M. P. D., & da Silva, S. M. (2022). Are politically connected firms in Brazil worried about anti-corruption disclosure? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(2), 300–317. <https://doi.org/10.1108/JAEE-05-2020-0118>
- Bitektine, A., & Haack, P. (2015). The “macro” and the “micro” of legitimacy: Toward a multilevel theory of the legitimacy process. *Academy of Management Review*, 40(1), 49–75. <https://doi.org/10.5465/amr.2013.0318>
- Candra, A. R., & Joni, J. (2025). *Politically connected independent supervisory board and financial distress during the COVID-19 pandemic*. 15(5), 949–964. <https://doi.org/10.1108/JAEE-08-2024-0336>
- Chouaibi, Y., Khlifi, S., & Chouaibi, J. (2025). *Do anti-corruption disclosure and good corporate governance moderate the relationship between REM and cost of equity ? (May)*. <https://doi.org/10.1108/CG-10-2024-0551>
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/10.2307/1388226>
- Duong, H. K., & Nguyen, H. C. (2025). *Anti-corruption disclosure and earnings management in Vietnam : the moderating impact of gender*. <https://doi.org/10.1108/ARA-12-2024-0381>
- Fatawijaya, C., Joni, J., Martusa, R., & Prayogo, E. (2025). *Political connected board of directors , sharia compliance and stock price synchronicity in Indonesia*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2025-0040>
- Ferreira, P., Oliveira, J., & Azevedo, G. (2024). Understanding the political connections of Portuguese companies through their board members. *European Journal of Management Studies*, 29(3), 339–360. <https://doi.org/10.1108/EJMS-10-2023-0073>

- Ghazwani, M., Alamir, I., & Salem, R. I. A. (2023). *Anti-corruption disclosure and corporate governance mechanisms: Insights from FTSE 100*. 32(2), 279–307. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2023-0211>
- Jannah, M., & Adhariani, D. (2021). Determinants of Anti-Corruption Disclosure in State-Owned Enterprise in Indonesia. *Proceedings of the Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference*, 558(Aprish 2019), 412–417. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210531.053>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Khairatun, S., & Setiawan, D. (2025). Perkembangan Indonesia Penelitian Disclosure. *Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 14(2), 164–178.
- Khan, A. U. (2024). *Political connection and firm's financial performance: the role of corporate governance*. 25(6), 1443–1460. <https://doi.org/10.1108/CG-04-2024-0223>
- Landis, C., & Paglietti, P. (2025). *Legitimacy and anti-corruption disclosures : insights into the early effects of the European Non-Financial Reporting Directive*. <https://doi.org/10.1108/JAOC-04-2023-0077>
- Masud, M. A. K., Bae, S. M., Manzanares, J., & Kim, J. D. (2019). Board directors' expertise and corporate corruption disclosure: The moderating role of political connections. *Sustainability (Switzerland)*, 11(16). <https://doi.org/10.3390/su11164491>
- Mehadi, M., & Mazumder, M. (2024). *A longitudinal examination of anti- corruption disclosure in the banking sector of a least-developed economy : does board composition make a difference ?* 32(5), 841–861. <https://doi.org/10.1108/ARA-12-2023-0351>
- Pramita, A. A. S., & Budiasih, I. G. A. N. (2025). The Influence of Corporate Governance on the Disclosure of Sustainability Reports with Profitability as a Moderating Variable. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(6), 5988–5998. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i6.3660>
- Previtali, P., & Cerchiello, P. (2023). Corporate governance and anti-corruption disclosure. *Corporate Governance (Bingley)*, 23(6), 1217–1232. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2022-0275>
- Rahmawati, W. (2025). *Political connections and narrative disclosure tone : the moderating role of the COVID-19 pandemic*. 33(3), 539–559. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2023-0198>
- Raimo, N., Vitolla, F., & Rubino, M. (2020). *Do audit committee attributes influence integrated reporting quality? An agency theory viewpoint*. 1–13. <https://doi.org/10.1002/bse.2635>
- Restuti, M. D. (2025). *Political connections , election years and cost stickiness : evidence*. (January). <https://doi.org/10.1108/PAR-04-2024-0073>
- Rudžionienė, K. (2025). *Determinants of mandatory and voluntary non-financial reporting in Lithuanian companies*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2025-0435>
- Salameh Alkhazaleh, S. J., Ibrahim, H., & Ali, A. J. (2024). Audit Committee Characteristics

- and Firm Performance with the Moderating Role of Political Connections. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 14(1), 115–132. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v14-i1/20227>
- Salihu, A. S. (2025). *Re-examining the fraud hexagon through corruption deterrence by regulatory undertakings and corporate disclosures in Nigerian*. 1014–1029. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2024-0262>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080331>
- Tessema, A. (2025). *Corporate governance and earnings management : the role of gender diversity and political connections in Gulf Cooperation Council countries*. (January), 929–950. <https://doi.org/10.1108/GM-05-2025-0274>
- Tuo, X., & Wu, J. (2025). *Shielding or propelling ? Political connections and corporate environmental sustainability : the moderating role of social*. <https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2024-0866>
- Utami, E. R., & Barokah, Z. (2025). *The determinants of corporate anti-corruption disclosures : evidence from construction companies in the Asia-Pacific*. 24(6), 1414–1441. <https://doi.org/10.1108/CG-04-2023-0152>
- Xie, B., Davidson, W. N., & DaDalt, P. J. (2003). *Earnings management and corporate governance: The role of the board and the audit committee*. 9(3), 295–316. [https://doi.org/10.1016/S0929-1199\(02\)00006-8](https://doi.org/10.1016/S0929-1199(02)00006-8)
- Yermack, D. (1996). *Higher market valuation of companies with a small board of directors*. 40(2), 185–211.

LAMPIRAN 1

Data Sampel Penelitian

No	Kode Emiten	Tahun	PAC	KOP	UKA	KKA	FRK	FSZ	ROA	LEV
1	BBCA	2020	1	0	3	0,67	23	20,80	0,025	0,83
		2021	1	0	3	0,67	28	20,93	0,026	0,84
		2022	1	0	3	0,67	23	21,00	0,031	0,83
		2023	1	0	3	0,67	30	21,07	0,035	0,83
		2024	1	0	3	0,67	31	21,09	0,038	0,82
2	BBRI	2020	0,67	0,30	8	0,50	24	21,20	0,012	0,82
		2021	0,67	0,25	8	0,63	16	21,24	0,018	0,83
		2022	0,67	0,20	7	0,71	22	21,35	0,028	0,84
		2023	1	0,10	7	0,71	23	21,40	0,031	0,84
		2024	1	0,10	9	0,67	21	21,41	0,030	0,84
3	BBNI	2020	1	0,30	5	1	17	20,61	0,004	0,84
		2021	1	0,40	5	1	29	20,69	0,011	0,87
		2022	1	0,30	5	1	41	20,75	0,018	0,86
		2023	1	0,27	5	1	34	20,81	0,019	0,86
		2024	1	0,27	5	1	31	20,85	0,019	0,85
4	BMRI	2020	0,67	0,50	7	1	21	21,15	0,012	0,77
		2021	1	0,55	7	1	22	21,27	0,018	0,77
		2022	0,67	0,44	7	1	25	21,41	0,023	0,77
		2023	0,67	0,54	7	1	28	21,50	0,028	0,76
		2024	0,67	0,50	7	1	24	21,61	0,025	0,77
5	BRIS	2020	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2021	1	0,40	9	0,78	26	19,40	0,016	0,91
		2022	0,67	0,40	6	0,83	25	19,54	0,019	0,89
		2023	0,67	0,40	6	1	18	19,68	0,021	0,89
		2024	0,67	0,40	6	1	22	19,83	0,023	0,89
6	BBTN	2020	0,67	0,50	4	1	23	19,70	0,004	0,89
		2021	0,67	0,40	5	1	30	19,73	0,006	0,88
		2022	0,67	0,20	5	1	41	19,81	0,008	0,87
		2023	0,67	0,50	5	1	35	19,90	0,008	0,87

		2024	0,67	0,40	5	1	39	19,97	0,006	0,87
7	BBKP	2020	0,67	0,12	7	0,6	14	18,20	0,041	0,89
		2021	0,67	0,25	7	1	14	18,31	0,037	0,85
		2022	0,67	0,25	5	1	11	18,31	0,056	0,88
		2023	0,67	0,25	5	1	15	18,25	0,072	0,83
		2024	0,67	0,16	4	1	15	18,24	0,076	0,90
8	AGRO	2020	0,67	0	3	1	11	17,15	0,001	0,85
		2021	0,67	0,2	4	0,75	8	16,64	-0,181	0,85
		2022	0,67	0,2	4	0,75	13	16,45	0,001	0,76
		2023	0,67	0,2	4	1	11	16,34	0,002	0,73
		2024	0,67	0	3	1	15	16,39	0,004	0,74
9	BJTM	2020	1	0,5	4	1	6	18,24	0,018	0,86
		2021	1	0,5	4	1	13	18,43	0,015	0,87
		2022	0,67	0,6	4	0,5	7	18,45	0,015	0,87
		2023	0,67	0,5	4	0,25	8	18,46	0,014	0,86
		2024	0,67	0,25	5	0,8	14	18,59	0,011	0,75
10	BTPS	2020	0,67	0,25	3	0,67	8	16,62	0,052	0,64
		2021	0,67	0,25	4	0,75	6	16,74	0,079	0,62
		2022	0,67	0,25	4	0,75	8	16,87	0,084	0,60
		2023	0,67	0,5	3	0,33	12	16,88	0,050	0,59
		2024	0,67	0,5	3	0,33	13	16,90	0,050	0,57
11	ARTO	2020	0,67	0	3	0,5	5	14,59	-0,087	0,43
		2021	0,67	0	3	1	5	16,33	0,007	0,33
		2022	0,67	0	3	1	7	16,65	0,001	0,51
		2023	0,67	0	3	1	9	16,87	0,003	0,61
		2024	0,67	0	3	1	12	17,17	0,005	0,70
12	BJBR	2020	0,67	0	4	1	13	18,76	0,012	0,87
		2021	1	0	3	1	16	18,88	0,013	0,87
		2022	1	0,20	4	1	16	19,02	0,012	0,87
		2023	1	0,33	5	1	15	19,05	0,009	0,87
		2024	1	0,17	3	1	24	19,21	0,007	0,86
13	BBYB	2020	0,67	0,33	3	0,67	4	15,51	0,003	0,79
		2021	0,67	0,50	3	0,67	4	16,24	-0,085	0,74
		2022	0,67	0,50	3	0,67	4	16,80	-0,040	0,81

		2023	0,67	0,33	3	0,67	9	16,72	-0,032	0,82
		2024	0,67	0,33	3	0,67	13	16,67	0,001	0,79
14	BABP	2020	0,67	0	4	1	15	16,27	0,001	0,87
		2021	0,67	0	4	1	7	16,46	0,001	0,83
		2022	0,67	0	4	1	8	16,64	0,003	0,83
		2023	0,67	0	4	1	7	16,71	0,004	0,80
		2024	0,67	0	4	1	9	16,85	0,004	0,82
15	BNGA	2020	0,67	0	3	1	13	19,45	0,007	0,85
		2021	0,67	0	3	1	13	19,55	0,013	0,86
		2022	0,67	0	5	1	12	19,54	0,017	0,85
		2023	0,67	0	5	1	14	19,63	0,019	0,85
		2024	0,67	0	4	1	14	19,70	0,019	0,85
16	BANK	2020	0,67	0	4	0,50	6	13,49	0,062	0,11
		2021	0,67	0	3	0,67	7	14,59	-0,055	0,52
		2022	0,67	0	5	0,8	6	15,37	-0,056	0,33
		2023	0,67	0	4	0,75	5	15,77	-0,032	0,56
		2024	0,67	0	4	0,75	12	16,05	-0,009	0,66
17	BACA	2020	0,67	0	3	1	5	16,82	0,003	0,91
		2021	0,67	0	3	1	8	16,92	0,001	0,90
		2022	0,67	0	3	1	7	16,84	0,001	0,84
		2023	0,67	0	3	1	6	16,77	0,005	0,82
		2024	0,67	0	3	1	13	16,93	0,005	0,70
18	BDMN	2020	0,67	0,33	4	1	7	12,21	0,005	0,78
		2021	0,67	0,43	5	1	6	12,17	0,009	0,76
		2022	0,67	0,25	5	1	6	12,19	0,017	0,76
		2023	0,67	0,14	4	1	7	12,31	0,016	0,77
		2024	0,67	0,17	4	1	14	12,40	0,013	0,79
19	BGTG	2020	0,67	0	4	1	5	15,49	0,001	0,79
		2021	0,67	0	4	1	5	15,97	0,001	0,75
		2022	0,67	0	4	1	5	16,01	0,005	0,65
		2023	0,67	0	3	1	11	16,06	0,011	0,65
		2024	0,67	0	3	1	7	16,15	0,019	0,67
20	BNLI	2020	0,67	0	4	1	11	19,10	0,004	0,82
		2021	0,67	0	4	1	12	19,27	0,005	0,84

		2022	0,67	0	4	1	11	19,36	0,008	0,85
		2023	0,67	0	4	1	15	19,37	0,010	0,84
		2024	0,67	0	4	1	16	19,38	0,014	0,83
21	BEKS	2020	0,67	0,25	4	0,75	18	15,49	-0,058	0,74
		2021	0,67	0,67	4	0,75	12	15,99	-0,030	0,79
		2022	0,67	0,50	4	0,75	16	15,79	-0,033	0,77
		2023	0,67	1	3	0,67	12	15,73	0,003	0,75
		2024	0,67	1	4	0,50	13	15,84	0,005	0,77
22	BNBA	2020	0,67	0	4	0,75	7	15,85	0,005	0,80
		2021	0,67	0,25	3	0,67	7	15,97	0,005	0,74
		2022	0,67	0,25	3	0,67	8	15,92	0,005	0,63
		2023	0,67	0,25	3	0,67	9	15,89	0,006	0,61
		2024	0,67	0,25	3	0,67	15	15,92	0,008	0,61
23	BNII	2020	0,67	0	3	0,67	21	18,97	0,007	0,84
		2021	0,67	0	5	0,80	24	18,94	0,010	0,82
		2022	0,67	0	5	0,80	22	18,90	0,010	0,81
		2023	0,67	0	5	0,80	19	18,96	0,010	0,82
		2024	0,67	0	5	0,80	19	19,10	0,006	0,84
24	SMBC	2020	0,67	0	4	1	29	19,03	0,011	0,82
		2021	0,67	0	4	1	23	19,07	0,016	0,81
		2022	0,67	0	4	1	20	19,16	0,017	0,81
		2023	0,67	0	4	1	25	19,12	0,013	0,79
		2024	0,67	0	4	1	26	19,30	0,013	0,77
25	MCOR	2020	0,67	0	3	0,67	25	17,04	0,002	0,76
		2021	0,67	0	3	0,67	21	17,08	0,003	0,77
		2022	0,67	0	3	0,67	20	17,04	0,005	0,75
		2023	0,67	0	2	1	12	17,14	0,009	0,76
		2024	0,67	0	3	1	16	17,33	0,009	0,80
26	PNBN	2020	0,67	0	5	0,60	5	12,29	0,014	0,78
		2021	0,67	0	5	0,60	5	12,23	0,001	0,76
		2022	0,67	0	5	0,60	5	12,27	0,015	0,76
		2023	0,67	0	5	0,60	7	12,31	0,013	0,76
		2024	0,67	0	5	0,60	13	12,40	0,012	0,77
27	INPC	2020	0,67	0,40	4	0,50	12	17,23	0,001	0,88

		2021	0,67	0,40	3	0,67	12	17,08	-0,006	0,85
		2022	1	0	3	0,67	12	17,05	0,002	0,84
		2023	1	0	3	0,67	12	17,08	0,006	0,84
		2024	0,67	0	3	0,67	12	17,22	0,005	0,86
28	BKSW	2020	0,67	0	3	0,33	11	16,72	-0,023	0,77
		2021	0,67	0	3	0,33	9	16,69	-0,090	0,77
		2022	0,67	0	3	0,33	12	16,63	-0,024	0,72
		2023	0,67	0	3	0,67	18	16,28	0,006	0,60
		2024	0,67	0	3	0,67	23	16,37	0,004	0,63
29	AMAR	2020	0,67	0	3	1	15	15,21	0,002	0,74
		2021	0,67	0	3	1	11	15,46	0,001	0,80
		2022	0,67	0	3	1	14	15,32	-0,034	0,30
		2023	0,67	0	3	1	16	15,29	0,041	0,25
		2024	0,67	0	3	1	16	15,40	0,044	0,31
30	MEGA	2020	0,67	0,40	3	0,67	14	11,63	0,033	0,83
		2021	0,67	0,40	3	0,67	11	11,80	0,037	0,86
		2022	0,67	0,50	3	0,67	10	11,86	0,036	0,85
		2023	0,67	0,40	3	0,33	14	11,79	0,026	0,83
		2024	0,67	0,50	3	0,33	20	11,81	0,019	0,84
31	NISP	2020	1	0	4	0,75	20	19,14	0,010	0,85
		2021	1	0	4	0,75	20	19,18	0,012	0,84
		2022	0,67	0	3	1	20	19,29	0,014	0,86
		2023	0,67	0	4	0,75	21	19,33	0,016	0,85
		2024	0,67	0	4	0,75	28	19,45	0,017	0,85
32	AGRS	2020	0,67	0	3	0,67	4	16,10	-0,018	0,81
		2021	0,67	0	3	0,67	7	16,47	0,001	0,79
		2022	0,67	0	3	0,33	10	16,72	0,006	0,77
		2023	0,67	0	3	0,33	9	16,78	0,009	0,72
		2024	0,67	0	4	0,25	14	16,82	0,011	0,72
33	BSIM	2020	0,67	0	3	0,67	8	17,61	0,003	0,86
		2021	0,67	0	6	0,80	9	17,78	0,002	0,86
		2022	0,67	0	3	1	8	17,67	0,005	0,84
		2023	0,67	0	3	1	11	17,78	0,001	0,85
		2024	0,67	0	3	1	12	17,83	0,007	0,84

34	DNAR	2020	0,67	0	3	0,67	5	15,56	0,001	0,60
		2021	0,67	0	5	0,60	6	15,86	0,002	0,61
		2022	0,67	0	4	0,75	5	16,14	0,001	0,65
		2023	0,67	0	4	0,75	6	16,22	0,003	0,68
		2024	0,67	0	4	1	12	16,29	0,004	0,69
35	BINA	2020	0,67	0	4	0,75	4	15,95	0,002	0,86
		2021	0,67	0	3	1	7	16,53	0,003	0,84
		2022	0,67	0	3	1	16	16,48	0,008	0,84
		2023	0,67	0	3	1	16	17,01	0,008	0,85
		2024	0,67	0	3	0,33	13	17,01	0,003	0,85
36	NOBU	2020	0,67	0	4	0,50	5	16,43	0,005	0,89
		2021	0,67	0	4	0,50	6	16,85	0,004	0,91
		2022	0,67	0	5	0,40	6	16,91	0,006	0,91
		2023	0,67	0	5	0,40	8	17,10	0,007	0,87
		2024	0,67	0	5	0,40	12	17,32	0,013	0,89
37	MAYA	2020	0,67	0,17	3	0,33	4	18,34	0,001	0,86
		2021	0,67	0,17	3	0,33	6	18,60	0,0004	0,88
		2022	0,67	0,17	3	0,33	6	18,72	0,0002	0,90
		2023	0,67	0	3	0,33	8	18,77	0,0002	0,89
		2024	0,67	0	3	0,33	13	18,83	0,0002	0,89
38	BMAS	2020	0,67	0	3	0,67	7	16,13	0,007	0,87
		2021	0,67	0	3	0,67	5	16,47	0,006	0,91
		2022	0,67	0	3	0,67	8	16,52	0,008	0,79
		2023	0,67	0	5	0,40	10	16,79	0,003	0,66
		2024	0,67	0	4	0,50	13	16,92	-0,011	0,71
39	MASB	2020	0,67	0	3	0,67	11	16,88	0,005	0,91
		2021	0,67	0	3	0,67	12	16,96	0,009	0,88
		2022	0,67	0	3	0,67	12	16,87	0,014	0,83
		2023	0,67	0	3	1	14	17,12	0,009	0,87
		2024	0,67	0	3	1	13	17,18	0,007	0,86
40	BCIC	2020	0,67	0,25	3	0,67	10	16,60	-0,030	0,91
		2021	0,67	0,25	3	0,33	15	16,88	0,021	0,87
		2022	0,67	0	3	0,33	15	17,33	0,003	0,90
		2023	0,67	0	3	0,33	20	17,48	0,0007	0,90

		2024	0,67	0	3	0,33	16	17,51	0,00007	0,91
41	BBSI	2020	0,67	0	2	0,50	12	14,18	0,024	0,30
		2021	0,67	0	2	0,50	12	14,72	0,026	0,16
		2022	0,67	0	4	0,75	12	15,01	0,022	0,07
		2023	0,67	0	5	0,80	8	15,11	0,036	0,12
		2024	0,67	0	3	0,67	12	15,71	0,019	0,50
42	BBMD	2020	0,67	0	3	0,33	10	16,47	0,023	0,72
		2021	0,67	0	3	0,33	12	16,59	0,032	0,73
		2022	0,67	0	3	0,33	10	16,62	0,031	0,72
		2023	0,67	0	3	0,33	12	16,59	0,026	0,69
		2024	0,67	0	3	0,33	13	16,62	0,024	0,69
43	TKIM	2020	0,33	0,43	3	0,33	4	17,65	0,048	0,51
		2021	0,33	0,43	3	0,67	4	17,67	0,079	0,44
		2022	0,33	0,43	3	0,67	4	17,79	0,131	0,37
		2023	1	0,43	3	0,67	4	17,81	0,048	0,34
		2024	1	0,43	3	1	4	17,87	0,077	0,30
44	ALDO	2020	0,33	0	3	0,67	6	13,77	0,053	0,38
		2021	0,67	0	3	0,67	6	14,01	0,063	0,42
		2022	1	0	3	1	6	14,27	0,042	0,51
		2023	1	0	3	1	10	14,38	0,002	0,54
		2024	1	0	3	1	4	14,53	-0,004	0,50
45	KBRI	2020	0,33	0,67	5	0,80	14	14,76	0,089	0,07
		2021	0,33	0,67	5	0,80	11	14,89	0,095	0,09
		2022	0,67	0,67	5	0,60	4	15,01	0,108	0,09
		2023	0,67	0,67	4	0,50	14	15,13	0,103	0,09
		2024	0,67	0,67	4	0,50	16	15,29	0,113	0,11
46	INRU	2020	0,33	0,67	3	0,67	9	15,76	0,008	0,67
		2021	0,33	0,67	3	0,67	11	15,78	0,001	0,67
		2022	0,33	0,67	3	0,67	8	15,76	0,040	0,71
		2023	0,67	0,25	3	0,67	7	15,79	-0,014	0,77
		2024	0,67	0,25	3	0,67	7	15,75	0,009	0,81
47	FASW	2020	0,33	0	3	1	5	16,26	0,031	0,60
		2021	0,33	0	3	1	6	16,40	0,046	0,61
		2022	0,33	0	3	0,67	11	16,37	0,009	0,47

		2023	0,33	0	3	0,67	10	16,34	-0,050	0,51
		2024	0,33	0	3	0,67	10	16,35	-0,087	0,59
48	INKP	2020	0,33	0,57	3	0,33	4	18,66	0,035	0,50
		2021	0,33	0,57	3	0,67	4	18,72	0,059	0,47
		2022	0,33	0,43	3	0,67	4	18,79	0,089	0,42
		2023	0,33	0,43	3	0,67	4	18,84	0,041	0,41
		2024	0,33	0,43	3	1	4	18,99	0,036	0,46
49	SPMA	2020	0,33	0	3	0,33	6	14,65	0,070	0,34
		2021	0,33	0	3	0,33	7	14,83	0,107	0,34
		2022	0,33	0	3	0,33	8	14,99	0,104	0,34
		2023	0,33	0	3	0,33	9	15,01	0,054	0,30
		2024	0,33	0	3	0,33	9	15,04	0,031	0,30
50	KDSI	2020	0,33	0	3	1	4	14,04	0,049	0,49
		2021	0,33	0	3	1	6	14,12	0,051	0,48
		2022	0,67	0	3	1	5	14,07	0,060	0,43
		2023	0,67	0	3	1	5	13,94	0,070	0,30
		2024	0,67	0	3	1	4	13,94	0,075	0,27
51	INTP	2020	0,67	0	3	1	4	17,12	0,066	0,19
		2021	0,67	0	3	1	4	17,08	0,068	0,21
		2022	0,67	0	3	1	5	17,06	0,071	0,24
		2023	0,67	0	3	1	6	17,20	0,066	0,29
		2024	0,67	0	3	1	4	17,23	0,066	0,27
52	SMCB	2020	0,33	0	3	1	6	16,85	0,031	0,63
		2021	0,33	0,50	3	1	6	16,88	0,033	0,48
		2022	0,33	0,50	3	1	5	16,88	0,040	0,44
		2023	0,33	0,50	3	1	5	16,91	0,040	0,44
		2024	0,33	0,40	3	1	5	16,86	0,035	0,39
53	SMBR	2020	0,33	0,43	3	0,33	4	15,46	0,002	0,43
		2021	0,67	0,40	3	0,67	21	15,49	0,009	0,43
		2022	0,67	0,60	3	0,65	5	15,47	0,015	0,41
		2023	1	0,60	4	1	21	15,40	0,025	0,35
		2024	1	0,50	4	1	20	15,41	0,026	0,33
54	WSBP	2020	0,67	0,20	3	1	19	15,97	-0,501	0,86
		2021	0,67	0,20	3	0,33	28	15,74	-0,282	1,40

		2022	0,67	0,50	3	0,33	25	15,60	0,113	1,10
		2023	0,67	0,20	3	0,67	34	15,31	0,001	0,59
		2024	0,67	0,40	3	0,67	19	15,10	-0,276	0,70
55	SMGR	2020	1	0,71	4	0,50	18	18,24	0,032	0,51
		2021	1	0,57	3	0,67	28	18,22	0,026	0,45
		2022	1	0,57	3	0,67	19	18,23	0,030	0,40
		2023	1	0,43	4	0,75	21	18,22	0,028	0,39
		2024	1	0,43	5	0,60	21	18,16	0,010	0,35
56	WTON	2020	1	0,40	3	0,33	4	15,98	0,014	0,60
		2021	1	0,50	3	0,33	7	16,02	0,009	0,62
		2022	1	0,20	3	0,33	9	16,06	0,018	0,61
		2023	1	0	3	0,33	4	15,85	0,003	0,52
		2024	1	0	3	0,33	4	15,79	0,009	0,49
57	JPFA	2020	0,33	0	3	0,67	8	17,07	0,035	0,56
		2021	0,33	0	3	0,67	8	17,17	0,071	0,54
		2022	0,33	0	3	0,67	5	17,30	0,046	0,58
		2023	0,33	0	3	0,67	7	17,35	0,028	0,58
		2024	0,33	0	3	0,67	6	17,36	0,093	0,52
58	CPIN	2020	1	0	3	0,67	25	17,25	0,123	0,25
		2021	1	0	3	0,67	27	17,38	0,102	0,29
		2022	1	0	3	0,67	35	17,50	0,073	0,34
		2023	1	0	3	0,33	43	17,53	0,057	0,34
		2024	1	0	3	0,33	38	17,57	0,087	0,29
59	SIPD	2020	0,33	0	3	0,33	4	14,77	0,011	0,64
		2021	0,33	0	3	0,33	5	14,84	-0,004	0,67
		2022	0,33	0	3	0,33	9	14,92	-0,073	0,76
		2023	0,67	0	3	0,33	5	15,00	-0,005	0,64
		2024	0,67	0	3	0,33	6	14,95	0,001	0,61
60	MAIN	2020	0,33	0	5	0,40	4	15,36	-0,008	0,54
		2021	0,33	0	5	0,40	4	15,51	0,011	0,56
		2022	0,33	0	5	0,40	4	15,56	0,005	0,58
		2023	1	0	5	0,40	4	15,52	0,011	0,55
		2024	1	0	5	0,40	4	15,50	0,091	0,40
61	BRNA	2020	0,33	0	3	1	4	14,49	-0,084	0,61

		2021	0,33	0	3	1	4	14,52	-0,093	0,58
		2022	0,33	0	3	1	4	14,44	-0,072	0,61
		2023	0,33	0	3	1	4	14,36	-0,048	0,63
		2024	0,33	0	3	1	4	14,60	-0,009	0,55
62	AKPI	2020	0,33	0	3	1	4	14,79	0,025	0,50
		2021	0,33	0	3	1	4	15,02	0,044	0,56
		2022	0,33	0	3	1	4	15,09	0,054	0,51
		2023	0,33	0	3	1	4	15,03	-0,009	0,51
		2024	0,33	0	3	1	4	15,03	0,003	0,48
63	ESIP	2020	0,33	0	3	0,67	6	18,17	0,022	0,32
		2021	0,33	0	3	0,67	6	18,25	0,007	0,37
		2022	0,33	0	3	0,67	1	18,40	0,006	0,03
		2023	0,33	0	3	0,67	4	18,43	0,009	0,04
		2024	1	0	3	0,67	4	18,44	0,009	0,04
64	IGAR	2020	0,33	0	3	0,67	5	13,41	0,066	0,11
		2021	0,67	0	3	0,67	12	13,61	0,091	0,14
		2022	0,67	0	3	0,67	4	13,67	0,082	0,09
		2023	0,67	0	3	0,67	4	13,72	0,042	0,08
		2024	0,67	0	3	0,67	4	13,79	0,051	0,08
65	IMPC	2020	0,33	0	3	0,67	4	14,80	0,043	0,44
		2021	0,33	0	3	0,67	4	14,86	0,066	0,41
		2022	0,33	0	3	0,67	4	15,18	0,080	0,40
		2023	0,33	0	3	0,67	4	15,23	0,111	0,36
		2024	0,33	0	3	0,67	4	15,31	0,121	0,52
66	FPNI	2020	0,33	0	3	0,33	4	14,62	-0,060	0,36
		2021	0,33	0	3	0,33	8	14,82	0,050	0,43
		2022	0,33	0	3	0,33	7	14,87	0,012	0,44
		2023	0,33	0	3	0,67	6	14,82	-0,029	0,41
		2024	0,33	0	3	0,67	7	14,70	-0,091	0,39
67	IPOL	2020	NA	NA	NA	NA	NA	15,25	0,030	0,37
		2021	0,33	0	3	1	4	15,32	0,032	0,38
		2022	0,33	0	3	1	4	15,25	0,013	0,36
		2023	0,67	0	3	1	4	15,26	0,001	0,38
		2024	0,67	0	3	1	5	15,53	0,003	0,52

68	SMKL	2020	0,33	0	3	0,67	4	13,56	0,052	1,21
		2021	0,33	0	3	0,67	4	13,85	0,103	1,06
		2022	0,33	0	3	0,67	6	14,52	0,038	0,53
		2023	0,33	0	3	0,67	6	14,45	0,006	0,51
		2024	0,33	0	3	0,67	6	14,53	0,011	0,54
69	PBID	2020	0,33	0	3	1	4	14,70	0,154	0,20
		2021	0,33	0	3	1	4	14,84	0,147	0,19
		2022	0,33	0	3	1	4	14,93	0,117	0,19
		2023	0,33	0	3	1	4	14,98	0,118	0,18
		2024	0,33	0	3	1	4	15,09	0,136	0,17
70	YPAS	2020	0,33	0	3	1	5	12,53	0,030	0,52
		2021	0,67	0	3	1	5	12,46	-0,037	0,53
		2022	0,67	0	6	1	5	12,58	-0,005	0,58
		2023	0,67	0	3	1	5	12,52	0,030	0,53
		2024	0,67	0	3	1	5	12,60	-0,015	0,58
71	TALF	2020	0,33	0	3	0,67	4	14,20	0,012	0,31
		2021	0,33	0	3	0,67	4	14,27	0,014	0,33
		2022	0,67	0	3	0,67	4	14,40	0,025	0,34
		2023	0,67	0	3	1	4	14,37	0,022	0,30
		2024	0,67	0	3	1	4	14,42	0,010	0,33
72	BRPT	2020	0,33	0	3	1	4	18,56	0,019	0,61
		2021	0,33	0	3	1	4	18,75	0,032	0,54
		2022	0,33	0	3	1	5	18,75	0,003	0,60
		2023	0,33	0	3	1	4	18,84	0,010	0,59
		2024	0,33	0	3	1	4	18,88	0,012	0,60
73	AGII	2020	0,33	0	3	0,67	4	15,78	0,014	0,52
		2021	0,33	0	3	0,67	4	15,91	0,026	0,56
		2022	0,33	0	3	0,67	4	15,89	0,012	0,55
		2023	0,67	0	3	0,67	5	15,87	0,022	0,52
		2024	1	0	3	0,67	6	15,90	0,014	0,53
74	DPNS	2020	0,33	0	3	0,33	4	12,67	0,015	0,10
		2021	0,33	0	3	0,33	4	12,80	0,067	0,15
		2022	0,33	0	3	0,33	4	12,91	0,069	0,19
		2023	0,33	0	3	0,33	6	12,76	0,062	0,04

		2024	0,33	0	3	0,33	6	12,79	0,019	0,06
75	EKAD	2020	0,33	0	3	1	8	13,89	0,086	0,12
		2021	0,33	0	3	1	6	13,97	0,090	0,12
		2022	0,33	0	3	1	8	14,02	0,063	0,09
		2023	0,33	0	3	1	10	14,04	0,058	0,08
		2024	0,33	0	2	1	8	14,07	0,050	0,08
76	BUDI	2020	0,33	0	3	1	4	14,90	0,023	0,55
		2021	0,33	0	3	1	4	14,91	0,031	0,54
		2022	0,33	0	3	1	4	14,97	0,029	0,54
		2023	0,33	0	3	1	4	15,01	0,031	0,52
		2024	0,33	0	3	0,67	4	15,15	0,018	0,57
77	MDKI	2020	0,33	0	3	0,67	7	13,79	0,041	0,09
		2021	0,33	0	3	0,67	8	13,80	0,039	0,08
		2022	0,67	0	3	0,67	6	13,86	0,037	0,10
		2023	0,67	0	3	0,67	11	13,88	0,045	0,09
		2024	0,67	0	3	0,67	7	13,85	0,028	0,06
78	INCI	2020	0,33	0	3	1	4	13,00	0,068	0,17
		2021	0,33	0	3	1	4	13,14	0,022	0,26
		2022	1	0	3	0,33	4	13,12	0,049	0,16
		2023	1	0	3	0,33	4	12,11	0,035	0,11
		2024	1	0	3	0,33	3	12,16	0,050	0,12
79	SRSN	2020	0,33	0	3	0,67	6	13,72	0,049	0,35
		2021	1	0	3	0,67	7	13,66	0,031	0,29
		2022	1	0	3	0,67	6	13,68	0,038	0,25
		2023	1	0	3	0,67	5	13,75	0,062	0,24
		2024	1	0	3	0,67	5	13,94	0,030	0,35
80	MOLI	2020	0,33	0	3	1	17	14,64	0,029	0,39
		2021	0,33	0	3	1	20	14,64	0,013	0,34
		2022	0,33	0	3	1	15	14,45	0,012	0,34
		2023	1	0	3	1	17	14,52	0,041	0,33
		2024	1	0	3	1	8	14,48	0,007	0,30
81	TPIA	2020	0,33	0	3	0,67	6	17,80	0,014	0,49
		2021	0,67	0	3	0,67	6	18,13	0,030	0,41
		2022	0,67	0	3	0,67	10	18,12	-0,030	0,43

		2023	0,67	0	3	0,67	7	18,25	-0,006	0,47
		2024	0,67	0	3	0,67	7	18,26	-0,010	0,48
82	UNIC	2020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2021	0,67	0,16	3	1	6	15,30	0,198	0,18
		2022	0,67	0,16	3	1	6	15,38	0,119	0,13
		2023	0,67	0,16	3	1	6	15,43	0,064	0,13
		2024	0,67	0,16	3	1	4	15,45	0,060	0,12
83	SINI	2020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2022	0,33	0	3	1	1	13,24	0,019	0,50
		2023	0,33	0	3	1	4	13,30	-0,016	2,04
		2024	0,33	0	3	1	4	13,60	-0,029	1,80
84	SULI	2020	0,33	0	3	0,33	5	14,06	-0,247	1,21
		2021	0,33	0	3	0,33	5	14,11	0,038	1,16
		2022	0,33	0	3	0,67	5	13,73	0,246	0,64
		2023	0,33	0	3	0,67	3	13,59	-0,266	0,83
		2024	0,33	0	3	0,67	3	13,44	-0,250	0,64
85	TIRT	2020	0,33	0	3	1	6	12,88	-1,050	1,90
		2021	0,33	0	3	0,33	6	12,55	-0,448	2,82
		2022	0,33	0	3	0,33	6	12,44	-0,342	3,39
		2023	0,33	0	3	0,33	6	12,28	-0,154	3,94
		2024	0,33	0	3	0,67	6	12,10	-0,224	4,75
86	AMFG	2020	0,33	0	3	0,33	11	15,89	-0,054	0,63
		2021	0,67	0	3	0,33	12	15,82	0,043	0,55
		2022	0,67	0	3	0,67	12	15,83	0,059	0,50
		2023	0,67	0	3	0,67	12	15,83	0,078	0,43
		2024	0,67	0	3	0,67	12	15,80	0,033	0,38
87	CAKK	2020	0,33	0	3	1	4	12,78	0,0004	0,36
		2021	0,33	0	3	1	4	13,00	0,028	0,45
		2022	0,67	0	3	1	4	13,01	0,024	0,44
		2023	0,67	0	3	1	4	13,05	-0,073	0,57
		2024	0,67	0	3	1	4	13,10	-0,033	0,62
88	KIAS	2020	0,33	0	3	0,67	6	14,07	-0,058	0,34
		2021	0,67	0	3	1	2	14,03	-0,046	0,37

		2022	0,67	0	3	1	6	14,01	-0,029	0,38
		2023	0,67	0	3	1	4	13,98	0,006	0,36
		2024	0,67	0	3	1	4	13,92	-0,062	0,39
89	ARNA	2020	0,67	0,50	3	1	14	14,49	0,166	0,34
		2021	0,67	0,50	3	1	12	14,62	0,212	0,30
		2022	0,67	0,50	3	1	12	14,76	0,225	0,29
		2023	0,67	0,50	3	1	17	14,78	0,171	0,29
		2024	0,67	0,50	3	1	13	14,79	0,161	0,29
90	MARK	2020	0,33	0	3	1	3	13,49	0,200	0,43
		2021	0,33	0	3	1	3	13,89	0,364	0,31
		2022	1	0	3	1	3	13,82	0,241	0,16
		2023	1	0	3	1	3	13,77	0,164	0,12
		2024	1	0	3	1	3	13,77	0,300	0,10
91	TOTO	2020	0,33	0	3	0,67	6	14,95	-0,010	0,38
		2021	0,33	0	3	1	12	14,99	0,048	0,34
		2022	0,33	0	3	1	12	15,01	0,095	0,30
		2023	0,33	0	3	1	12	15,02	0,073	0,29
		2024	0,33	0	3	1	12	15,05	0,091	0,29
92	MLIA	2020	0,33	0	3	0,67	6	15,56	0,010	0,53
		2021	0,33	0	3	1	6	15,62	0,106	0,44
		2022	0,33	0	3	1	6	15,73	0,125	0,34
		2023	0,67	0	3	1	13	15,76	0,080	0,29
		2024	0,67	0	3	1	7	15,77	0,044	0,24
93	ALKA	2020	0,67	0	3	1	4	12,94	0,016	0,75
		2021	0,67	0	3	1	4	13,12	0,035	0,74
		2022	0,67	0	3	1	4	13,37	0,075	0,71
		2023	0,67	0	3	1	4	12,73	0,124	0,39
		2024	0,67	0	3	1	4	12,32	-0,019	0,05
94	ALMI	2020	0,33	0	3	1	4	14,23	-0,187	1,19
		2021	0,33	0	2	1	4	14,16	0,0004	0,61
		2022	0,33	0	2	1	4	13,91	-0,043	0,54
		2023	0,33	0	2	1	4	13,66	-0,186	0,60
		2024	0,33	0	2	1	4	12,94	-0,541	0,72
95	BTON	2020	0,33	0	3	1	4	12,37	0,019	0,20

		2021	0,33	0	3	1	4	12,51	0,036	0,27
		2022	0,33	0	3	1	4	12,75	0,116	0,31
		2023	0,67	0	3	1	4	12,80	0,048	0,29
		2024	0,67	0	3	1	4	12,89	0,074	0,29
96	BAJA	2020	0,33	0	3	1	4	13,54	0,072	0,83
		2021	0,33	0	3	1	4	13,50	0,122	0,70
		2022	0,67	0	3	1	4	13,50	-0,141	0,85
		2023	1	0	3	1	4	13,50	-0,002	0,85
		2024	1	0	3	1	4	13,47	-0,080	0,92
97	CTBN	2020	0,33	0	3	0,67	4	14,49	-0,023	0,24
		2021	0,33	0	3	0,67	4	14,53	-0,117	0,34
		2022	0,33	0	3	0,67	5	14,51	-0,050	0,38
		2023	1	0	3	0,67	4	14,76	0,109	0,40
		2024	1	0	3	0,67	4	14,91	0,132	0,35
98	GGRP	2020	0,33	0,20	3	0,33	4	16,55	-0,009	0,33
		2021	0,67	0,20	3	0,67	9	16,59	0,058	0,29
		2022	0,67	0,33	3	0,67	11	16,69	0,049	0,32
		2023	0,67	0	3	1	8	16,73	0,031	0,25
		2024	0,67	0	3	0,33	6	16,29	0,156	0,13
99	GDST	2020	0,33	0	3	1	4	14,28	-0,049	0,47
		2021	0,33	0	3	1	4	14,28	-0,040	0,50
		2022	0,33	0	3	1	4	14,56	0,130	0,50
		2023	0,67	0	3	1	4	14,62	0,096	0,43
		2024	0,67	0	3	1	4	14,83	0,038	0,51
100	INAI	2020	0,33	0	3	1	4	14,15	0,003	0,77
		2021	0,33	0	3	1	4	14,25	0,003	0,75
		2022	0,67	0	3	1	4	14,26	-0,073	0,81
		2023	0,67	0	3	1	4	14,20	-0,039	0,81
		2024	0,67	0	3	1	4	14,03	-0,079	0,84
101	KRAS	2020	1	0,67	4	0,50	73	17,77	0,007	0,85
		2021	1	0,67	4	0,50	71	17,85	0,012	0,84
		2022	1	0,55	4	0,50	80	17,67	0,007	0,82
		2023	1	0,50	4	0,50	55	17,57	-0,046	0,82
		2024	1	0,67	4	0,50	56	17,59	-0,051	0,85

102	ISSP	2020	0,67	0	3	0,33	6	15,62	0,029	0,45
		2021	0,67	0	3	0,33	4	15,77	0,068	0,47
		2022	0,67	0	6	0,50	2	15,82	0,041	0,44
		2023	0,67	0	3	0,67	2	15,89	0,062	0,42
		2024	0,67	0	3	0,33	7	15,93	0,064	0,39
103	LION	2020	0,33	0	3	1	4	13,38	-0,015	0,31
		2021	0,33	0	3	1	4	13,45	-0,006	0,36
		2022	0,33	0	3	1	4	13,43	0,003	0,31
		2023	0,33	0	3	1	4	13,52	0,009	0,34
		2024	0,67	0	3	1	7	13,48	0,015	0,30
104	LMSH	2020	0,33	0	3	1	4	11,87	-0,056	0,24
		2021	0,33	0	3	1	4	11,89	0,045	0,20
		2022	0,33	0	3	1	4	11,79	-0,036	0,16
		2023	0,67	0	3	1	4	11,74	-0,046	0,16
		2024	0,67	0	3	1	4	11,69	-0,063	0,18
105	PICO	2020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2021	0	0	3	0,33	4	13,89	-0,045	0,82
		2022	0	0	3	0,33	3	13,83	0,009	0,80
		2023	0,33	0	3	0,33	6	13,51	0,008	0,72
		2024	0,33	0	3	0,33	6	13,48	0,004	0,71
106	NIKL	2020	0,33	0	3	0,33	14	14,50	0,00002	0,63
		2021	0,33	0	3	0,67	12	14,85	0,00003	0,71
		2022	0,33	0	3	0,67	9	14,89	0,00004	0,69
		2023	0,33	0,33	3	0,33	6	14,53	-0,00003	0,59
		2024	0,33	0,33	3	0,33	9	14,52	-0,00000	0,59
107	TBMS	2020	0,33	0	3	0,33	4	14,67	0,048	0,67
		2021	0,33	0	3	1	4	14,61	0,081	0,61
		2022	0,33	0	3	1	4	14,52	0,058	0,54
		2023	0,33	0	3	1	4	14,57	0,074	0,53
		2024	0,33	0	3	1	4	14,63	0,093	0,51
108	AMIN	2020	0,33	0	3	1	4	12,77	-0,163	0,60
		2021	0,67	0	3	1	4	12,65	0,012	0,53
		2022	0,67	0	3	1	4	12,69	0,025	0,52
		2023	1	0	3	1	4	12,76	0,044	0,52

		2024	1	0	3	1	4	12,62	0,060	0,40
109	GMFI	2020	1	0,20	3	0,67	7	15,87	-0,631	1,41
		2021	1	0,40	3	0,67	10	15,60	-0,320	1,411
		2022	1	0,40	3	0,67	7	15,58	0,009	1,85
		2023	1	0,20	3	0,67	12	15,72	0,045	1,85
		2024	1	0,20	3	0,67	9	15,67	0,063	1,70
110	ARKA	2020	0,33	0	3	1	3	13,02	-0,068	0,80
		2021	0,33	0	3	1	4	13,05	0,007	0,79
		2022	0,33	0	3	1	4	13,08	0,013	0,79
		2023	0,33	0	3	1	4	13,02	0,013	0,75
		2024	0,33	0	3	1	2	12,94	0,007	0,73
111	ARGO	2020	0,33	0	3	0,67	6	13,97	-0,064	2,15
		2021	0,33	0	3	0,67	6	13,95	-0,025	2,18
		2022	0,33	0	3	0,67	4	13,94	-0,086	2,22
		2023	0,67	0	3	0,67	4	13,90	-0,032	0,88
		2024	0,67	0	3	0,67	4	13,93	-0,007	0,89
112	CNTB	2020	0,33	0,33	3	0,67	4	13,18	-0,140	1,20
		2021	0,33	0,33	3	0,67	4	13,27	-0,136	1,32
		2022	0,33	0,33	3	0,67	4	13,27	-0,051	1,37
		2023	0,33	0	3	0,67	3	13,04	-0,176	1,64
		2024	0,33	0	3	0,67	3	13,82	-0,346	2,15
113	ADMG	2020	0,33	0,40	3	0,33	5	14,91	-0,188	0,19
		2021	0,33	0,40	3	0,33	4	14,90	0,002	0,16
		2022	0,33	0,40	3	0,33	4	14,73	-0,155	0,15
		2023	0,33	0,40	3	0,33	5	14,65	-0,120	0,21
		2024	0,33	0,40	3	0,67	5	14,63	-0,066	0,25
114	BELL	2020	0,67	0	3	0,67	6	13,22	-0,030	0,54
		2021	0,67	0	3	0,67	12	13,17	0,008	0,50
		2022	1	0	3	0,67	12	13,17	0,008	0,50
		2023	1	0	3	0,67	12	13,18	0,022	0,50
		2024	1	0	3	0,67	12	13,28	0,020	0,53
115	ERTX	2020	0,33	0	3	0,67	4	13,81	-0,014	0,73
		2021	0,33	0	3	0,67	4	13,87	0,022	0,73
		2022	0,33	0	3	0,67	4	13,95	0,050	0,70

		2023	0,33	0	3	0,67	4	13,96	0,035	0,69
		2024	0,33	0	3	0,67	4	14,00	0,018	0,68
116	ESTI	2020	0,33	0	3	1	4	13,58	-0,011	0,76
		2021	0,33	0	3	1	4	13,52	0,031	0,71
		2022	0,33	0	3	1	4	13,47	0,001	0,69
		2023	0,33	0	3	1	6	13,47	0,027	0,68
		2024	0,33	0	3	1	7	13,43	0,014	0,65
117	HDTX	2020	0,33	0	3	1	4	12,86	-0,125	0,94
		2021	0,33	0	3	1	4	12,75	-0,121	1,06
		2022	0,33	0	1	1	4	12,49	-0,216	1,29
		2023	0,33	0	1	1	0	12,38	-0,062	1,39
		2024	0,33	0	1	1	0	12,27	-0,131	1,56
118	PBRX	2020	0,33	0	3	1	10	16,12	0,028	0,60
		2021	0,33	0,33	3	1	10	16,13	0,022	0,58
		2022	0,33	0,67	3	1	10	16,17	0,003	0,53
		2023	0,33	0,50	3	1	10	16,13	-0,006	0,52
		2024	0,33	0,50	3	1	4	15,13	-1,770	1,47
119	MYTX	2020	0,33	0,50	3	1	4	15,17	-0,027	0,99
		2021	1	0,50	3	1	4	15,14	-0,036	1,03
		2022	1	0,67	3	1	4	15,19	-0,005	1,04
		2023	1	0,67	3	1	4	15,13	-0,091	1,13
		2024	1	0,67	3	1	4	15,01	-0,022	1,17
120	POLU	2020	0,33	0	3	0,67	6	12,55	-0,022	0,43
		2021	0,33	0	3	0,67	6	12,22	-0,253	0,32
		2022	0,33	0	3	0,67	6	12,25	-0,030	0,38
		2023	0,33	0	3	0,67	4	12,16	-0,079	0,36
		2024	0,33	0	3	0,67	4	12,23	-0,006	0,39
121	SRIL	2020	0,33	0	3	0,67	4	9,72	0,074	1,02
		2021	0,33	0	3	0,67	4	9,79	-0,871	1,32
		2022	0,33	0	3	0,67	4	9,31	-0,517	2,02
		2023	0,33	0	3	0,67	4	9,15	-0,270	2,47
		2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
122	POLY	2020	0,33	0,33	3	1	4	15,02	-0,089	5,17
		2021	0,33	0,33	3	1	4	15,05	0,007	5,03

		2022	0,33	0,33	3	1	4	15,01	0,054	5,14
		2023	0,33	0,33	3	0,67	4	14,94	-0,053	5,52
		2024	0,33	0,33	3	0,67	4	14,27	-0,445	10,20
123	SSTM	2020	0,33	0	3	0,67	6	13,09	-0,032	0,61
		2021	0,33	0	3	0,67	6	13,06	-0,028	0,48
		2022	0,33	0	3	0,67	4	13,00	-0,014	0,46
		2023	0,33	0	3	0,67	4	12,96	-0,015	0,44
		2024	0,33	0	3	0,67	4	12,89	-0,016	0,45
124	STAR	2020	0,67	0	3	1	4	13,12	0,012	0,003
		2021	0,67	0	3	1	4	13,14	0,021	0,004
		2022	0,67	0	3	1	4	13,14	0,003	0,002
		2023	0,67	0	3	1	4	13,14	0,005	0,003
		2024	0,33	0	3	1	4	13,15	0,008	0,003
125	TFCO	2020	0,33	0	3	0,67	4	15,34	-0,003	0,09
		2021	0,33	0	3	0,67	4	15,40	0,039	0,10
		2022	0,33	0	3	1	4	15,39	0,010	0,08
		2023	0,33	0	3	0,67	4	15,40	0,010	0,07
		2024	0,67	0	3	0,33	4	15,40	0,009	0,07
126	TRIS	2020	0,33	0	3	1	6	13,88	-0,010	0,40
		2021	1	0	3	1	7	13,88	0,004	0,38
		2022	1	0	3	1	8	13,98	0,029	0,40
		2023	0,67	0	3	1	4	13,97	0,033	0,38
		2024	1	0	2	1	5	14,05	0,037	0,39
127	UCIT	2020	0,33	0	3	0,67	4	15,85	0,041	0,41
		2021	0,33	0	3	0,67	4	15,87	0,061	0,37
		2022	0,33	0	3	0,67	4	15,94	0,037	0,38
		2023	0,33	0	3	0,67	4	15,95	0,051	0,34
		2024	0,33	0	3	0,67	4	15,97	0,040	0,32
128	ZONE	2020	0,33	0	3	0,67	9	13,24	-0,067	0,54
		2021	0,33	0	3	0,67	6	13,24	0,055	0,50
		2022	0,67	0	3	0,67	6	13,39	0,112	0,47
		2023	0,67	0	3	0,67	4	13,53	0,062	0,50
		2024	0,67	0	3	0,67	4	13,53	0,009	0,50
129	PTSN	2020	0,33	0	3	0,33	4	14,45	0,037	0,36

		2021	0,33	0	3	0,33	4	14,74	0,034	0,48
		2022	0,33	0	3	0,33	4	14,58	0,067	0,32
		2023	0,33	0	3	0,67	4	14,61	0,073	0,28
		2024	0,33	0	3	0,67	4	14,63	0,051	0,26
130	SLIS	2020	1	0	3	0,67	6	12,86	0,069	0,53
		2021	1	0	3	0,67	4	12,89	0,064	0,48
		2022	1	0,50	3	0,67	4	13,01	0,094	0,45
		2023	1	0,50	3	0,67	4	12,07	0,045	0,27
		2024	1	0,50	3	0,67	4	12,97	0,011	0,19
131	CCSI	2020	0,33	0	3	0,33	5	13,12	0,057	0,32
		2021	0,33	0	3	0,33	4	13,17	0,074	0,30
		2022	0,33	0	3	0,33	4	13,59	0,063	0,45
		2023	0,33	0	3	0,67	4	13,53	-0,029	0,45
		2024	0,33	0	3	0,67	12	13,41	0,006	0,37
132	JECC	2020	0,33	0	2	1	13	14,23	0,008	0,51
		2021	0,67	0	3	1	14	14,37	-0,027	0,60
		2022	0,67	0	3	1	12	14,60	0,026	0,66
		2023	0,67	0	3	1	12	14,59	0,030	0,63
		2024	0,67	0	3	1	6	14,75	0,030	0,67
133	IKBI	2020	0,33	0	3	1	4	14,17	-0,014	0,29
		2021	0,33	0	3	1	4	14,33	-0,004	0,40
		2022	0,33	0	3	1	4	14,39	0,029	0,41
		2023	0,33	0	3	1	4	14,29	0,070	0,29
		2024	0,33	0	3	1	4	14,43	0,046	0,36
134	KBLM	2020	0,33	0	3	0,67	4	13,84	0,006	0,18
		2021	0,33	0	3	0,67	4	14,22	-0,009	0,19
		2022	0,33	0	3	0,67	4	14,23	0,020	0,17
		2023	0,67	0	3	0,67	4	14,28	0,019	0,21
		2024	0,67	0	3	0,67	4	14,45	0,040	0,25
135	KBLI	2020	0,33	0,20	3	0,67	4	14,92	-0,024	0,22
		2021	0,33	0,20	3	0,67	4	14,82	0,034	0,10
		2022	0,33	0,20	3	0,67	4	14,84	0,021	0,11
		2023	0,67	0,20	3	0,67	4	14,91	0,039	0,13
		2024	0,67	0,25	3	1	4	14,95	0,072	0,11

136	SCCO	2020	0,33	0	3	0,67	4	15,13	0,064	0,12
		2021	0,33	0	3	0,67	4	15,36	0,030	0,06
		2022	0,67	0	3	0,67	4	15,45	0,021	0,08
		2023	0,67	0	3	0,67	4	15,49	0,044	0,07
		2024	0,67	0	3	0,67	4	15,56	0,052	0,06
137	VOKS	2020	0,33	0	3	1	4	14,89	0,0009	0,62
		2021	0,33	0	3	1	4	14,88	-0,073	0,69
		2022	0,67	0	3	1	6	14,80	-0,072	0,73
		2023	0,67	0	3	1	14	14,78	0,007	0,72
		2024	0,67	0	3	1	5	14,42	-0,049	0,65
138	AUTO	2020	0,33	0,12	3	0,67	6	16,54	-0,002	0,26
		2021	0,33	0,12	3	0,67	7	16,64	0,037	0,30
		2022	0,67	0,12	3	0,67	8	16,73	0,080	0,29
		2023	0,67	0,12	3	0,67	8	16,79	0,103	0,26
		2024	1	0,12	3	0,67	8	16,86	0,104	0,26
139	ASII	2020	1	0,12	4	0,75	5	19,64	0,055	0,42
		2021	1	0,1	4	0,75	4	19,72	0,070	0,41
		2022	1	0,1	4	0,75	5	19,84	0,098	0,41
		2023	1	0,1	4	0,75	5	19,91	0,100	0,44
		2024	1	0,09	4	0,75	5	19,98	0,092	0,42
140	BOLT	2020	1	0	3	0,67	8	13,93	-0,051	0,37
		2021	1	0	3	0,67	8	14,13	0,060	0,40
		2022	1	0	3	0,67	9	13,49	0,110	0,61
		2023	1	0	3	0,67	9	14,11	0,083	0,35
		2024	1	0	3	0,67	8	14,15	0,067	0,37
141	BRAM	2020	0,33	0	3	1	5	15,19	-0,015	0,21
		2021	0,33	0	3	1	6	15,29	0,086	0,28
		2022	0,33	0	3	1	6	15,29	0,110	0,23
		2023	0,67	0	3	1	7	15,31	0,051	0,24
		2024	0,67	0	3	1	8	15,29	0,041	0,23
142	GDYR	2020	0,33	0	3	0,67	5	14,37	-0,061	0,61
		2021	0,33	0	3	0,67	4	14,40	0,020	0,60
		2022	0,33	0	3	0,33	4	14,44	-0,025	0,63
		2023	0,67	0	3	0,33	4	14,34	0,051	0,55

		2024	0,67	0	3	0,33	4	14,42	0,051	0,53
143	GJTL	2020	0,33	0	3	1	4	16,69	0,018	0,61
		2021	0,33	0	3	1	5	16,73	0,004	0,62
		2022	0,33	0	3	1	6	16,76	-0,010	0,62
		2023	0,33	0,16	3	0,67	6	16,76	0,061	0,56
		2024	0,33	0,16	3	0,67	6	16,84	0,058	0,54
144	IMAS	2020	0,33	0	3	1	5	17,69	-0,014	0,74
		2021	0,33	0	3	1	4	17,75	-0,005	0,75
		2022	0,33	0	3	1	5	17,86	0,010	0,75
		2023	0,33	0	3	1	5	17,96	0,012	0,75
		2024	0,33	0,16	3	1	5	18,03	0,005	0,76
145	INDS	2020	0,33	0,33	3	0,67	2	14,85	0,021	0,09
		2021	0,33	0,33	3	0,67	2	14,97	0,050	0,16
		2022	0,33	0,33	3	0,67	2	15,17	0,058	0,23
		2023	0,33	0,33	3	0,67	4	15,31	0,043	0,22
		2024	0,33	0,33	3	0,67	4	15,26	0,019	0,17
146	SMSM	2020	0,33	0	3	0,33	7	15,03	0,160	0,21
		2021	0,33	0	3	0,33	7	15,17	0,188	0,25
		2022	0,67	0	3	1	7	15,30	0,213	0,24
		2023	0,67	0	3	1	8	15,34	0,226	0,21
		2024	0,67	0	3	1	8	15,42	0,225	0,21
147	ULTJ	2020	0,33	0	3	1	4	15,98	0,127	0,45
		2021	0,33	0	2	1	4	15,82	0,172	0,31
		2022	0,33	0	3	1	4	15,81	0,131	0,21
		2023	0,67	0	2	1	4	15,83	0,158	0,11
		2024	0,67	0	3	1	4	15,95	0,136	0,12
148	CEKA	2020	0,33	0	3	0,67	4	14,26	0,116	0,19
		2021	0,33	0	3	0,67	4	14,34	0,110	0,18
		2022	0,33	0	3	0,67	4	14,36	0,128	0,10
		2023	0,67	0	3	0,67	4	14,45	0,081	0,13
		2024	0,67	0	3	0,67	4	14,69	0,136	0,20
149	CAMP	2020	0,33	0	3	1	4	13,90	0,041	0,11
		2021	0,33	0	3	1	4	13,95	0,089	0,11
		2022	0,33	0	3	1	4	13,89	0,113	0,12

		2023	0,67	0	3	1	4	13,90	0,117	0,12
		2024	0,67	0	3	1	4	13,89	0,090	0,14
150	CLEO	2020	0,33	0	3	0,67	4	14,09	0,101	0,31
		2021	0,67	0	3	0,67	4	14,11	0,134	0,26
		2022	0,67	0	3	0,67	4	14,40	0,107	0,32
		2023	0,67	0	3	0,67	4	14,65	0,133	0,34
		2024	0,67	0	3	0,67	4	14,80	0,175	0,27
151	AISA	2020	0,67	0,17	3	0,33	3	14,51	0,599	0,59
		2021	1	0,17	3	0,33	4	14,38	0,005	0,53
		2022	1	0,17	3	0,33	4	14,42	-0,034	0,57
		2023	1	0,50	3	0,33	4	14,43	0,010	0,48
		2024	1	0,50	3	0,33	5	14,49	0,035	0,47
152	ICBP	2020	1	0	3	1	6	18,45	0,064	0,51
		2021	1	0	3	1	2	18,59	0,054	0,53
		2022	1	0	3	1	6	18,56	0,040	0,50
		2023	1	0	3	1	6	18,60	0,059	0,48
		2024	1	0	3	1	2	18,65	0,056	0,47
153	COCO	2020	0,33	0	3	1	8	12,48	0,010	0,57
		2021	0,33	0	3	1	8	12,82	0,023	0,41
		2022	0,33	0	3	1	8	13,09	0,014	0,58
		2023	0,33	0	3	1	8	13,18	-0,095	0,71
		2024	0,33	0	3	1	8	12,99	-0,119	0,78
154	DLTA	2020	0,33	0,20	3	0,33	5	14,02	0,101	0,17
		2021	0,33	0,20	3	1	4	14,08	0,144	0,23
		2022	0,33	0,20	3	1	4	14,08	0,176	0,23
		2023	0,33	0,20	3	1	4	14,00	0,165	0,23
		2024	0,33	0,20	3	1	4	13,93	0,127	0,24
155	DMND	2020	0,33	0,20	3	0,67	4	15,55	0,035	0,18
		2021	0,33	0,20	3	0,67	6	15,65	0,055	0,20
		2022	0,33	0,20	3	0,67	6	15,74	0,055	0,21
		2023	1	0,20	3	0,67	6	15,79	0,043	0,19
		2024	1	0,20	3	0,67	6	15,82	0,049	0,17
156	FOOD	2020	0,33	0	3	0,33	4	11,64	-0,154	0,50
		2021	0,33	0	3	0,67	5	11,58	-0,138	0,59

		2022	0,67	0	3	0,67	5	11,53	-0,216	0,59
		2023	0,67	0	3	0,67	5	10,84	-0,400	0,58
		2024	0,67	0	3	0,67	5	10,79	0,489	1,04
157	GOOD	2020	0,33	0,20	3	0,67	4	15,71	0,037	0,56
		2021	0,67	0,20	3	0,67	10	15,73	0,073	0,55
		2022	0,67	0,09	3	0,67	9	15,81	0,071	0,54
		2023	0,33	0,09	3	0,67	5	15,82	0,081	0,47
		2024	0,33	0,11	3	0,67	5	15,95	0,081	0,52
158	HOKI	2020	0,33	0	3	1	5	13,72	0,042	0,27
		2021	0,33	0	3	1	5	13,80	0,013	0,32
		2022	0,33	0	3	1	5	13,61	0,0001	0,18
		2023	0,33	0	3	1	5	13,86	-0,003	0,37
		2024	0,33	0	3	1	6	13,93	-0,005	0,42
159	IKAN	2020	0,33	0	3	1	5	11,79	-0,008	0,48
		2021	0,33	0	3	1	6	11,77	0,012	0,45
		2022	0,33	0	3	1	4	11,74	0,016	0,42
		2023	0,67	0	3	1	4	11,86	0,007	0,48
		2024	0,67	0	3	1	5	11,84	0,003	0,46
160	INDF	2020	0,33	0,12	3	1	6	18,91	0,054	0,51
		2021	0,33	0,12	3	1	6	19,00	0,063	0,51
		2022	0,33	0,12	3	1	6	19,01	0,051	0,48
		2023	0,33	0,12	3	1	6	19,04	0,062	0,46
		2024	0,33	0,12	3	1	6	19,12	0,065	0,46
161	KEJU	2020	0,33	0,33	3	1	6	13,42	0,179	0,35
		2021	0,33	0,33	3	1	8	13,55	0,188	0,24
		2022	0,33	0,33	3	1	3	13,66	0,136	0,18
		2023	0,67	0,17	3	1	8	13,63	0,097	0,19
		2024	0,67	0,17	3	1	8	13,79	0,151	0,24
162	MLBI	2020	0,33	0,17	3	1	6	14,88	0,098	0,51
		2021	0,33	0,17	3	1	5	14,89	0,228	0,62
		2022	0,33	0,17	3	1	5	15,03	0,274	0,68
		2023	1	0	3	1	4	15,04	0,313	0,59
		2024	1	0	3	1	5	15,05	0,332	0,62
163	MYOR	2020	0,33	0	3	0,67	5	16,80	0,104	0,43

		2021	0,67	0	3	0,67	6	16,80	0,060	0,43
		2022	0,67	0	3	0,67	4	16,92	0,087	0,42
		2023	0,67	0	3	0,67	4	16,99	0,134	0,36
		2024	0,67	0	3	0,67	4	17,21	0,101	0,42
164	PANI	2020	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2021	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2022	1	0	3	0,67	4	17,15	0,010	0,73
		2023	1	0	3	0,67	5	15,33	0,023	0,43
		2024	1	0	3	0,33	9	17,63	0,028	0,41
165	PCAR	2020	0,33	0	3	0,67	3	11,54	-0,154	0,38
		2021	0,33	0	3	0,67	4	11,52	0,013	0,44
		2022	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2023	0,67	0	3	0,67	4	11,56	0,088	0,36
		2024	0,67	0	3	0,67	4	11,43	-0,004	0,29
166	PSDN	2020	0,33	0	3	1	4	13,55	-0,068	0,84
		2021	0,33	0	3	1	4	13,47	-0,114	0,93
		2022	0,33	0	3	1	4	13,47	-0,037	0,94
		2023	0,33	0	3	1	4	11,93	0,944	0,56
		2024	0,33	0	3	1	4	11,89	-0,140	0,68
167	ROTI	2020	1	0	3	0,67	8	15,31	0,038	0,27
		2021	1	0	3	0,67	7	15,25	0,067	0,32
		2022	1	0	3	0,67	4	15,23	0,105	0,35
		2023	1	0	3	0,67	9	15,19	0,084	0,39
		2024	1	0	3	0,67	9	15,14	0,097	0,38
168	SKBM	2020	0	0	3	0,67	4	14,39	0,006	0,46
		2021	0	0	3	0,67	4	14,49	0,015	0,50
		2022	0	0	3	0,67	4	14,53	0,042	0,47
		2023	0	0	3	0,67	4	14,42	0,0008	0,42
		2024	0	0	3	0,67	4	14,43	-0,041	0,46
169	SKLT	2020	1	0	3	1	4	13,56	0,056	0,47
		2021	1	0	3	1	4	13,70	0,096	0,39
		2022	1	0	3	1	4	13,85	0,073	0,43
		2023	1	0	3	1	4	14,06	0,061	0,36
		2024	1	0	3	1	4	14,24	0,078	0,40

170	STTP	2020	0,33	0	3	0,33	4	15,05	0,182	0,22
		2021	0,33	0	3	0,33	4	15,18	0,158	0,16
		2022	0,67	0	3	0,33	4	15,34	0,136	0,14
		2023	0,67	0	3	0,33	4	15,52	0,167	0,12
		2024	0,67	0	3	0,33	4	15,73	0,194	0,09
171	DVLA	2020	0,67	0,14	3	1	4	14,50	0,082	0,33
		2021	1	0	3	1	4	14,55	0,070	0,34
		2022	1	0,	3	1	4	14,51	0,074	0,31
		2023	1	0	3	0,67	4	14,53	0,072	0,31
		2024	1	0	3	0,67	4	14,59	0,072	0,33
172	INAF	2020	1	0,20	3	0,67	12	14,35	0,0000	0,75
		2021	1	0,20	3	0,67	11	14,51	-0,019	0,75
		2022	1	0	3	0,67	12	14,21	-0,309	1,00
		2023	1	0	2	0,50	15	13,54	-0,950	2,06
		2024	1	0	2	0,50	12	13,33	-0,541	2,85
173	KAEF	2020	0,33	0,60	4	0,50	33	16,68	0,001	0,60
		2021	1	0,50	4	0,50	28	16,69	0,016	0,59
		2022	1	0,50	4	0,50	15	16,52	-0,044	0,77
		2023	1	0,28	4	0,50	14	16,63	-0,136	0,71
		2024	1	0	4	0,50	26	16,76	-0,063	0,63
174	KLBF	2020	0,33	0	3	0,67	4	16,93	0,124	0,19
		2021	0,33	0	3	0,67	6	17,06	0,126	0,17
		2022	0,33	0	3	0,67	8	17,12	0,127	0,19
		2023	0,33	0	3	0,67	8	17,11	0,103	0,15
		2024	0,33	0	3	0,67	4	17,20	0,110	0,16
175	MERK	2020	0,33	0	3	0,67	4	13,74	0,077	0,34
		2021	0,33	0	3	0,33	4	13,84	0,128	0,33
		2022	0,67	0	3	0,33	4	13,85	0,173	0,27
		2023	0,67	0	3	0,33	6	13,77	0,186	0,17
		2024	0,67	0	3	0,33	5	13,77	0,160	0,16
176	PYFA	2020	0,33	0	3	1	4	12,34	0,097	0,31
		2021	0,33	0	3	1	4	13,60	0,007	0,79
		2022	0,33	0	3	1	4	14,24	0,181	0,71
		2023	0,67	0	3	1	4	14,24	-0,056	0,77

		2024	0,67	0	3	1	4	15,58	-0,057	0,82
177	SIDO	2020	0,33	0	3	0,67	7	15,16	0,243	0,16
		2021	0,33	0	3	1	10	15,22	0,310	0,15
		2022	0,33	0	3	1	8	15,22	0,271	0,14
		2023	0,33	0	3	1	8	15,17	0,244	0,13
		2024	0,67	0	4	1	7	15,19	0,297	0,11
178	TSPC	2020	0	0,40	3	0,33	4	16,02	0,086	0,30
		2021	0	0,40	3	0,33	4	16,08	0,085	0,29
		2022	0	0,40	3	0,33	4	16,24	0,088	0,33
		2023	0	0,40	3	0,33	4	16,24	0,104	0,29
		2024	0	0,40	3	0,33	4	16,34	0,116	0,27
179	GGRM	2020	0,67	0	3	0,67	7	18,17	0,098	0,25
		2021	0,67	0	3	0,67	8	18,31	0,062	0,34
		2022	0,67	0	3	0,67	7	18,30	0,031	0,35
		2023	0,67	0	3	0,67	7	18,34	0,058	0,34
		2024	0,67	0	3	0,67	7	18,26	0,011	0,27
180	HMSP	2020	0,33	0	3	0,67	5	17,72	0,173	0,39
		2021	0,33	0	3	0,67	5	17,79	0,134	0,45
		2022	0,33	0	3	0,67	5	17,82	0,115	0,49
		2023	0,33	0	3	0,67	5	17,83	0,146	0,46
		2024	0,33	0	3	0,67	5	17,81	0,122	0,48
181	ITIC	2020	0,33	0	3	1	5	13,13	0,012	0,45
		2021	0,33	0	3	1	4	13,17	0,035	0,38
		2022	0,33	0	3	1	4	13,22	0,043	0,34
		2023	0,33	0	3	1	4	13,24	0,048	0,29
		2024	0,33	0	3	1	4	13,37	0,033	0,32
182	RMBA	2020	0	0,20	3	0,67	4	16,34	-0,214	0,54
		2021	0	0,20	3	0,67	4	16,05	0,0009	0,38
		2022	0	0,20	3	0,67	4	16,00	0,107	0,24
		2023	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
183	WIIM	2020	0,33	0	3	1	6	14,29	0,107	0,26
		2021	0,33	0	3	1	8	14,45	0,093	0,30
		2022	0,33	0	3	1	5	14,59	0,115	0,31

		2023	0,67	0	3	1	9	14,76	0,192	0,28
		2024	0,67	0	3	1	8	14,92	0,099	0,37
184	ADES	2020	0,33	0	3	0,67	4	13,77	0,142	0,27
		2021	0,33	0	3	0,67	6	14,08	0,204	0,26
		2022	0,67	0	3	0,67	6	14,31	0,222	0,19
		2023	0,67	0	3	0,33	6	14,55	0,190	0,17
		2024	0,67	0	3	0,33	6	14,81	0,195	0,16
185	KINO	2020	0,33	0	3	0,67	4	15,48	0,022	0,51
		2021	0,33	0	3	0,67	4	15,49	0,019	0,50
		2022	0,67	0	3	0,67	12	15,36	-0,203	0,67
		2023	0,67	0	3	0,67	16	15,35	0,017	0,65
		2024	0,67	0	3	0,67	18	15,32	0,020	0,63
186	MBTO	2020	0,33	0	2	0,50	20	13,80	-0,207	0,40
		2021	0,33	0	2	0,50	20	13,48	-0,210	0,38
		2022	0,33	0	2	0,50	4	13,49	-0,059	0,44
		2023	0,33	0	2	1	4	13,42	-0,047	0,45
		2024	0,33	0	2	1	4	13,41	-0,007	0,45
187	MRAT	2020	0,33	0	2	0,50	4	13,23	-0,012	0,39
		2021	0,33	0	2	0,50	4	13,27	0,0006	0,41
		2022	0,67	0	2	0,50	4	13,45	0,098	0,41
		2023	0,67	0	2	0,50	4	13,36	-0,022	0,37
		2024	0,67	0	2	0,50	4	13,61	-0,006	0,30
188	TCID	2020	1	0	3	0,33	13	14,66	-0,043	0,20
		2021	1	0	3	0,33	13	14,65	-0,033	0,21
		2022	1	0	4	0,25	15	14,68	0,008	0,22
		2023	1	0	3	0,33	13	14,69	0,016	0,21
		2024	1	0	4	0,25	13	14,66	-0,053	0,24
189	UNVR	2020	0,33	0,33	3	0,67	5	16,84	0,349	0,76
		2021	0,33	0,50	4	0,75	5	16,76	0,302	0,77
		2022	0,67	0,50	3	0,67	5	16,72	0,293	0,78
		2023	0,67	0,50	3	0,67	4	16,63	0,288	0,80
		2024	1	0,50	3	0,67	7	16,59	0,210	0,87

LAMPIRAN 2

Hasil Analisis Data

Statistik Deskriptif

summarize y x1 x2 x3 x4 fs prof lev

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
y	933	.564373	.2509522	0	1
x1	933	.091522	.1778569	0	1
x2	933	3.227224	.7736462	1	9
x3	933	.7594319	.2374335	.25	1
x4	933	8.270096	7.62098	1	80
fs	933	15.37001	2.103371	9.15	21.61
prof	933	.0236484	.111066	-.95	.944
lev	933	.5859646	.5900238	.002	10.2

Uji Estimasi Model

Uji Chow

F(188, 737) = 8.56
Prob > F = 0.0000

Uji Hausman

Prob > chi2 = 0.0589

Uji Asumsi Klasik

Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
fs	1.49	0.673311
x4	1.44	0.693207
x2	1.35	0.740353
prof	1.23	0.812389
lev	1.21	0.829050
x1	1.17	0.852682
x3	1.02	0.979738
Mean VIF	1.27	

Uji Hipotesis

Uji t

y	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
x1	-.0180598	.0710433	-0.25	0.799	-.1573021	.1211825
x2	.0154302	.0085972	1.79	0.073	-.0014199	.0322804
x3	.0242906	.0619106	0.39	0.695	-.097052	.1456331
x4	.0059094	.0015772	3.75	0.000	.0028181	.0090006
fs	.0233913	.0076687	3.05	0.002	.0083609	.0384217
prof	.0116932	.0630465	0.19	0.853	-.1118756	.1352619
lev	-.0146634	.012928	-1.13	0.257	-.0400018	.0106749
_cons	.0969235	.1221077	0.79	0.427	-.1424031	.3362501
sigma_u	.18461448					
sigma_e	.14553946					
rho	.61671901	(fraction of variance due to u_i)				

Uji f

Wald chi2(7) = 73.05
 Prob > chi2 = 0.0000

Uji Koefisien Determinasi

R-squared:
 Within = 0.0096
 Between = 0.1863
 Overall = 0.1383

LAMPIRAN 3

Hasil Robustness Check per Sektor

Statistik Deskriptif Sektor Keuangan

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
y	209	.7063158	.1035213	.67	1
x1	209	.1281818	.1984545	0	1
x2	209	3.909091	1.242811	2	9
x3	209	.7611962	.2381822	.25	1
x4	209	13.78947	7.553889	4	41
fs	209	17.25617	2.234783	11.63	21.61
prof	209	.0082286	.0261031	-.181	.084
lev	209	.7685167	.1525936	.07	.91

Multikolinearitas Keuangan

Variable	VIF	1/VIF
fs	1.96	0.510414
x4	1.73	0.578702
x2	1.34	0.748303
lev	1.21	0.828648
x1	1.15	0.868986
x3	1.08	0.922177
prof	1.07	0.934779
Mean VIF	1.36	

Uji t, f, dan Koefisien Determinasi Keuangan

Random-effects GLS regression Number of obs = 209
Group variable: id Number of groups = 42

R-squared: Obs per group:

 Within = 0.0092 min = 4
 Between = 0.2658 avg = 5.0
 Overall = 0.1864 max = 5

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Wald chi2(7) = 9.03
 Prob > chi2 = 0.2502

(Std. err. adjusted for 42 clusters in id)

y	Coefficient	Robust std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
x1	-.0091388	.0676609	-0.14	0.893	-.1417518	.1234741
x2	-.0019832	.0059131	-0.34	0.737	-.0135728	.0096063
x3	.0501163	.0499958	1.00	0.316	-.0478737	.1481064
x4	.0010063	.0009852	1.02	0.307	-.0009246	.0029373
fs	.0137071	.0061157	2.24	0.025	.0017205	.0256937
prof	.0384179	.1152233	0.33	0.739	-.1874156	.2642515
lev	.0077108	.021914	0.35	0.725	-.0352399	.0506615
_cons	.4201317	.0916433	4.58	0.000	.240514	.5997493
sigma_u	.07154181					
sigma_e	.06498774					
rho	.54789439	(fraction of variance due to u_i)				

Statistik Deskriptif Manufaktur

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
y	724	.5220304	.2640799	0	1
x1	724	.0809392	.1701361	0	.71
x2	724	3.030387	.3924098	1	6
x3	724	.7589227	.2373795	.25	1
x4	724	6.665746	6.87078	0	80
fs	724	14.82552	1.714933	9.15	19.98
prof	724	.0280997	.1249679	-.95	.944
lev	724	.5332666	.6554765	.002	10.2

Multikolinearitas Manufaktur

Variable	VIF	1/VIF
x1	1.26	0.791937
prof	1.26	0.794081
x4	1.22	0.819367
lev	1.21	0.828435
fs	1.21	0.829818
x2	1.15	0.868970
x3	1.06	0.946713
Mean VIF	1.19	

Uji t, f, Koefisien Determinasi Manufaktur

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	724
Group variable: id	Number of groups	=	147
R-squared:	Obs per group:		
Within = 0.0152	min =		3
Between = 0.1009	avg =		4.9
Overall = 0.0739	max =		5
	Wald chi2(7)	=	31.78
corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Prob > chi2	=	0.0000

(Std. err. adjusted for 147 clusters in id)

		Robust				
y	Coefficient	std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
x1	-.0509409	.0997212	-0.51	0.609	-.2463907	.144509
x2	.0311445	.0208045	1.50	0.134	-.0096316	.0719207
x3	.0225263	.0814146	0.28	0.782	-.1370435	.182096
x4	.0076655	.0022052	3.48	0.001	.0033435	.0119876
fs	.0176571	.0116506	1.52	0.130	-.0051776	.0404918
prof	.0183152	.0655485	0.28	0.780	-.1101575	.1467879
lev	-.0191591	.0144895	-1.32	0.186	-.0475581	.0092399
_cons	.1108479	.2049517	0.54	0.589	-.2908501	.5125459
sigma_u	.20068094					
sigma_e	.16153381					
rho	.60682929	(fraction of variance due to u_i)				